

**PENGARUH FASILITAS PENDIDIKAN DAN GURU
PROFESIONAL TERHADAP MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH
MENENGAH ATAS DI INDONESIA PADA TAHUN 2010-2014**

**ADE IRMA PRAVITASARI
8105108049**



**Skripsi Ini Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam
Mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
KONSENTRASI PENDIDIKAN EKONOMI KOPERASI
JURUSAN EKONOMI DAN ADMINISTRASI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2015**

***THE INFLUENCE OF EDUCATIONAL FASILITIES AND
PROFESSIONAL TEACHERS ABOUT THE EQUALITY OF HIGH
SCHOOL EDUCATION IN INDONESIA IN 2010-2014***

**ADE IRMA PRAVITASARI
8105108049**



Skripsi in Written as Part Of Bachelor Degree in Education Accomplishment

**STUDY PROGRAM OF ECONOMICS EDUCATION
CONCENTRATION IN ECONOMICS EDUCATION COOPERATIVE
DEPARTEMENT OF ECONOMICS AND ADMINISTRATION
FACULTY OF ECONOMICS
STATE UNIVERSITY OF JAKARTA
2015**

ABSTRAK

ADE IRMA PRAVITASARI. “Pengaruh Fasilitas Pendidikan Dan Guru Profesional Terhadap Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas Di Indonesia Tahun 2010-2014”. Skripsi Pendidikan Ekonomi Koperasi. Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2015. Dosen Pembimbing: Dr. SitiNurjanah, SE, M.Si dan Dicky Iranto, SE, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari Fasilitas pendidikan dan Guru Profesional Terhadap Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Indonesia baik secara simultan maupun secara parsial. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan jenis data *time series* periode 2010-2014 dan *cross section* sebanyak 33 Provinsi di Indonesia, penyeleksian ini dipilih berdasarkan data setiap tahunnya terdapat di daerah tersebut. Penelitian ini menghasilkan 165 observasi, diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. Metode penelitian menggunakan metode *ekspose facto*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Dengan menggunakan model analisis regresi berganda menggunakan software *Eviews 7,0*, output menunjukkan bahwa Fasilitas Pendidikan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Mutu Pendidikan (Y) di Indonesia dan Guru Profesional (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Mutu Pendidikan (Y) di Indonesia. Dari hasil Uji F dengan memperhatikan nilai signifikansinya = $0,000000 < 0,05$ maka dapat dikatakan secara simultan fasilitas pendidikan dan guru profesional berpengaruh signifikan pada $\alpha = 5\%$ terhadap mutu pendidikan di Indonesia Nilai koefisien determinasi (R^2) diperoleh sebesar 0.835683 memiliki pengertian bahwa mutu pendidikan dapat dijelaskan oleh perubahan fasilitas pendidikan dan guru profesional sebesar 83,56% sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak ada dalam model penelitian ini. Kesimpulannya terdapat pengaruh fasilitas pendidikan terhadap mutu pendidikan sebesar 0,0477 dan pengaruh guru profesional terhadap mutu pendidikan sebesar 0,0000.

Kata Kunci : Mutu Pendidikan, Fasilitas Pendidikan, Guru Profesional

ABSTRACT

ADE IRMA PRAVITASARI . "The Influence Of Educational Facilities and Professional Teachers About The Equality Of High School Education In Indonesia In 2010-2014" . Thesis Economic Education Cooperative. Department of Economics and Administration. Faculty of Economics. State University of Jakarta. 2015. Lecturer Advisor: Dr. SitiNurjanah , SE , M.Si and Dicky Iranto , SE, M.Si.

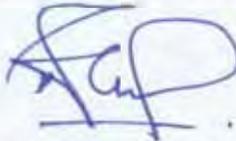
This study aims to determine how big the Influence Of Educational Facilities and Professional Teachers About The Equality Of High School Education In Indonesia either simultaneously or partially. The data used in this research is secondary data, the type of data time series and cross section the 2010-2014 period a total of 33 provinces in Indonesia, the selection have been based on data contained in the area each year. This research resulted in 165 observations, obtained from the Central Bureau of Statistics, Ministry of Education and Culture and the National Accreditation Board for School / Madrasah. The research method used factoteknik exposure method of data analysis used in this study is multiple regression analysis. Using the model of multiple regression analysis using software Eviews 7.0, the output indicates that the Education Facilities (X1) and significant positive effect on the Quality of Education (Y) in Indonesia and Teachers (X2) and significant a positive effect on the Quality of Education (Y) in Indonesia. From the results of F test with due regard to the significance value = $0.000000 < 0.05$, it can be said simultaneous education facilities and professional teachers have a significant effect pada $\alpha = 5\%$ of the quality of education in Indonesia Coefficient of determination (R²) obtained by 0.835683 had the sense that the quality education can be explained by changes in education facilities and professional teachers for 83.56%, while the rest is explained by other factors that do not exist in this research model. Kesimpulanya there is impact on educational quality educational facilities at 0.0477 and professional teacher influence on the quality of education at 0.0000.

Keywords : Quality Education , Educational Facilities , Professional Teachers

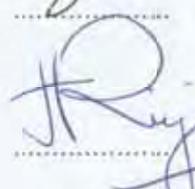
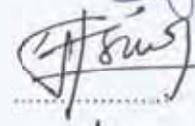
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Dedi Purwana, E.S., M.Bus
NIP. 19671207 199203 1 001

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. <u>Karuniana Dianta A. S., SIP, ME</u> NIP. 19800924 200812 1 002	Ketua Penguji		06/11/2016
2. <u>Suparno, M.Pd</u> NIP. 19790828 201404 1 001	Sekretaris		06/11/2016
3. <u>Dra. Endang Sri Rahayu, M.Pd</u> NIP. 19530320 198203 2 001	Penguji Ahli		06/11/2016
4. <u>Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si</u> NIP. 19720114 199802 2 001	Pembimbing I		06/11/2016
5. <u>Dicky Iranto, SE, M.Si</u> NIP. 19710612 200112 1 001	Pembimbing II		06/11/2016

Tanggal Lulus: 15 Desember 2015

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, Desember 2015

Yang Membuat Pernyataan



Ade Irma Pravitasari
NIM. 8105108049

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Akan kuberikan ilmu yang kumiliki kepada siapapun, asal mereka mau memanfaatkan ilmu yang telah kuberikan itu.

(Imam Syafi'i)

Bagi orang berilmu yang ingin meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, maka kuncinya hendaklah ia mengamalkan ilmunya kepada orang-orang.

(Syaikh Abdul Qodir Jailani).

Ilmu menginginkan untuk diamalkan. Apabila orang mengamalkannya, maka ilmu itu tetap ada. Namun sebaliknya, jika tidak diamalkan, maka ilmu akan hilang dengan sendirinya.

(Sufyan ats-Tsauri).

Satu-satunya hal yang aku miliki yang paling berharga dalam hidup ini adalah kedua orang tua ku tanpa kalian aku tak mungkin ada di sini tanpa kalian hidup ku terasa hampa

terima kasih ayah kau telah menjadi ayah yang sempurna untuk aku
terima kasih ibu kau telah menjadi ibu yang sempurna untuk aku
terima kasih atas warna yang telah engkau kibarkan dalam hidup ku
terima kasih atas jasa-jasa yang kalian berikan untuk aku
terima kasih atas pengorbanan dan perjuangan kalian untuk aku
terima kasih telah melahirkan aku ke dunia ini
terima kasih ayah terima kasih ibu telah menjadikan aku anak yang soleha

aku berjanji akan selalu menjaga dan melindungi ayah dan ibu di saat waktunya tiba
di saat ayah dan ibu tak mampu lagi untuk berjalan
di saat ayah dan ibu tak mampu lagi untuk bekerja
aku akan menggantikan mu
aku akan merawat mu
dan aku akan menjaga kalian sampai kalian terlelap tidur
dan skripsi ini ku persembahkan untuk kalian 😊

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah yang maha baik yang telah memberikan segala nikmat iman dalam ruh dan nikmat ilmu dalam akal sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “pengaruh fasilitas pendidikan dan guru profesional terhadap mutu pendidikan sekolah menengah atas di Indonesia”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana pendidikan.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, Peneliti mendapat bimbingan, kritik, saran, dan dukungan baik moril, maupun materil dari semua pihak. Maka dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Siti Nurjanah, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi sekaligus selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan motivasi yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Dicky Iranto, SE. M.SE, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan pemikirannya kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Dedi Purwana, ES,.M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Bapak Drs. Nurdin Hidayat, MM, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Bapak Karuniana Dianta A.S., S.IP, ME selaku Ketua Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi.
4. Bapak dan Ibuku serta adikku yang senantiasa memberikan do'a, semangat dan dukungan berupa moril maupun meteril. Alhamdulillah Jazakhumullahu Khoiro.
5. Sahabat-sahabat terdekatku Arti Kusuma, Dianty Putri Yuliani, Vidia Chairunisa, Khaerunnisa Nur Rizkia, Leny Wijaya, Neisyah Fatiah Anisa, Shinta Dyah, Dwi Rahmawati dan teman-teman Ekop Non Reg 2010 yang telah banyak memberikan warna untuk berani bermimpi.

6. Ibu Denty selaku Sub Gerai Informasi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ibu Deby selaku humas Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah yang telah membantu penulis dalam melakukan observasi penelitian ini.

Penulis menyadari dalam penelitian ini masih banyak kekurangan maupun kesalahan. Oleh karena itu, demi penyempurnaan dan perbaikan, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat.

Jakarta, Desember 2015

Ade Irma Pravitasari

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORIGINALITAS	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Pembatasan Masalah	12
D. Perumusan Masalah	13
E. Kegunaan Penelitian	13
BAB II. KAJIAN TEORETIK	
A. Deskripsi Konseptual	
1. Mutu Pendidikan	14
2. Fasilitas Pendidikan	20
3. Guru Profesional	28

B. Hasil Penelitian Yang Relevan	36
C. Kerangka Teoretik	37
D. Perumusan Hipotesis.....	40
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian	41
B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian	41
C. Metode Penelitian	42
D. Jenis dan Sumber Data.....	42
E. Operasionalisasi Variabel Penelitian	43
F. Konstelasi Hubungan Antar Variabel	44
G. Teknik Analisis Data	45
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENDAHULUAN	
A. Deskripsi Data.....	56
B. Analisis Data.....	72
C. Pembahasan	83
D. Keterbatasan Hasil Penelitian	94
BAB V. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	
A. Kesimpulan	95
B. Implikasi	96
C. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	103

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
I.1	Rata-Rata Akreditasi Sekolah Menengah Atas Tahun 2010-2014.....	3
IV.1	Rata-Rata Mutu Pendidikan Menengah Atas Nasional Menurut Provinsi Tahun 2010-2014	58
IV.2	Rata-Rata Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas Menurut Provinsi Tahun 2010-2014	63
IV.3	Rata-Rata Guru Profesional Sekolah Menengah Atas Menurut Provinsi Tahun 2010-2014	68
IV.4	Uji Chow.....	73
IV.5	Uji Hausman	74
IV.6	Persamaan Regresi.....	76
IV.7	Uji T	79
IV.8	Uji F	81
IV.9	Uji R ²	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
IV. 4	Uji Normalitas	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah sumber daya manusia menjadi salah satu permasalahan paling penting bagi negara berkembang seperti Indonesia. Masalah sumber daya tersebut tidak bisa terlepas dari bidang pendidikan, yang secara umum di identikkan dengan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah maupun dengan perguruan tinggi. Seperti yang diungkapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk memperlancar tujuan tersebut maka dibutuhkanlah sebuah lembaga pendidikan yang disebut sekolah. Dalam pendidikan formal (sekolah) ada beberapa jenjang pendidikan, mulai dari yang paling dasar sampai dengan yang paling tinggi. Salah satu jenjang pendidikan di Indonesia adalah Sekolah Menengah Atas (SMA).

Terkait dengan dunia pendidikan, tujuan dari dunia pendidikan adalah untuk menciptakan manusia yang berkualitas yaitu seperti memiliki pengetahuan yang cukup dan memiliki kemampuan belajar yang cukup baik pula. Sehingga, untuk melihat seseorang tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan belajar yang cukup baik dapat dilihat dari prestasi belajarnya. Kebanyakan orang berasumsi bahwa prestasi akademik yang rendah berarti seseorang tersebut tidak mampu menerima materi

pelajaran dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Berbeda dengan yang memiliki prestasi akademik yang baik, akan dianggap memiliki pengetahuan yang baik pula dan dianggap mampu belajar. Dalam mendapatkan prestasi yang memuaskan berbagai cara dapat ditempuh oleh seorang siswa, salah satu cara yang positif adalah dengan cara belajar yang giat, sedangkan cara yang negatif adalah dengan mencontek.

Berdasarkan data dari *Human Development Indeks* (HDI) tahun 2008, Indonesia menempati posisi 112, turun dari tahun sebelumnya yang berada pada posisi 107 dari 112 Negara. Hal ini mengakibatkan perlu adanya suatu usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan di setiap jenjang pendidikan.¹

Menurut data dari UNESCO yang dipublikasikan oleh *Education for All Global Monitoring Report 2011, Education Development Index (EDI)*, Indonesia berada pada posisi ke-69 atau empat strip di bawah Malaysia yang berada di posisi ke-65 dari 127 negara di dunia dan jauh tertinggal dari Brunei yang berada di posisi ke-34.²

Pada tiap tahunnya mutu pendidikan di Indonesia bisa dibilang standar atau jauh dari negara-negara maju lainnya, maka dari itu berbagai terobosan dan kebijakan penting telah diambil oleh kemdiknas dalam rangka meningkatkan akses pendidikan yang merata dan bermutu sejalan

¹Azizah Fitri, ISO Bukan Sekedar Isonisasi (<http://aziza-fitri-anakganto.blogspot.com/2014/05/iso-bukan-sekedar-isonisasi.html>) diakses pada tanggal 08 April 2015 pukul 13.45

²Rani Hardjanti, Soal pendidikan, Indonesia kalah dengan Malaysia (<http://news.okezone.com/read/2012/10/23/373/708026/soal-pendidikan-indonesia-kalah-dengan-malaysia>) diakses pada tanggal 08 April 2015 pukul 14.04

dengan komitmen yang digariskan oleh UNESCO melalui program Education for All (EFA).³

Dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan nasional secara bertahap, terencana dan terukur sesuai amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah melakukan akreditasi untuk menilai kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) dengan Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005.⁴

Tabel I.1

Rata-Rata Akreditasi Sekolah Menengah Atas

Tahun	Akreditasi
2010	81,43
2011	78,03
2012	79,58
2013	72,47
2014	73,87

Sumber: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah

Berdasarkan Tabel I.1 dapat dijelaskan bahwa rata-rata akreditasi sekolah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 sampai 2011 sekolah mengalami penurunan sebesar 3,4. Rata-rata penurunan sekolah masih terus dirasakan pada tahun 2012 79,58, tahun 2013 72,47 dan tahun 2014 73,87 masih terus mengalami fluktuasi. Lalainya sekolah-sekolah yang

³Lukman Coroners, *Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan* (<http://lukmancoroners.blogspot.com/2010/05/upaya-peningkatan-mutu-pendidikan.html>) diakses pada tanggal 08 April 2015 pukul 15.47

⁴Fatah Arafat, *Makalah Penjaminan Mutu Pendidikan* (http://www.academia.edu/9548241/MAKALAH_PENJAMINAN_MUTU_PENDIDIKAN) diakses pada tanggal 09 April 2015 pukul 16.35

tidak memperpanjang status akreditasinya dan ada pula Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah yang tidak melakukan visitasi ke sekolah-sekolah untuk menilai kelayakan sekolah-sekolah tersebut.

Kriteria pemeringkatan hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah memperoleh peringkat akreditasi A (amat baik), jika memperoleh Nilai Akhir (NA) lebih besar dari 85 sampai dengan 100, peringkat akreditasi B (baik), jika memperoleh Nilai Akhir lebih besar dari 70 sampai dengan 85, peringkat akreditasi C (cukup baik), jika memperoleh Nilai Akhir lebih besar dari atau sama dengan 56 sampai dengan 70, dengan ketentuan kriteria status terakreditasi terpenuhi.

Pada tahun 2014 sebanyak 611 sekolah di Riau tidak diperkenankan untuk menyelenggarakan Ujian Nasional (UN). Hal ini disebabkan sekolah-sekolah tersebut belum memiliki akreditasi. Akibatnya para siswa terpaksa menjalani UN dengan menumpang ke sekolah lain. Sekolah-sekolah yang belum memiliki akreditasi tersebut tidak hanya terdapat di kabupaten saja, tapi di ibu kota provinsi Riau dan Pekanbaru juga cukup banyak belum terakreditasi. Jumlahnya mencapai 69 sekolah. Di Pekanbaru dari 611 sekolah yang belum memiliki akreditasi itu, untuk tingkat SD sebanyak 208 sekolah, SLTP/MTs sebanyak 216 sekolah, dan SLTA sebanyak 79 sekolah, SMK sebanyak 85 sekolah dan SLB 23 sekolah. Jumlah sekolah yang paling banyak belum terakreditasi terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu sebanyak 122 sekolah dari 1.071 sekolah

yang ada. Sedangkan daerah yang paling sedikit sekolahnya belum terakreditasi adalah Kabupaten Pelalawan hanya 13 sekolah.⁵

Kurangnya mutu pendidikan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: profesional guru, kurikulum, fasilitas pendidikan, kepala sekolah dan biaya pendidikan.⁶

Dalam perspektif makro banyak faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, yaitu: faktor kurikulum, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan khususnya dalam kegiatan proses belajar mengajar, aplikasi metode, strategi dan pendekatan pendidikan yang mutakhir dan modern, biaya pendidikan yang memadai, manajemen pendidikan yang profesional, sumberdaya manusia profesional.⁷

Ukuran penyelenggaraan pendidikan bermutu tidak terlepas dari delapan standar nasional pendidikan oleh BSNP yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui PP No.19/2005. Terdapat delapan SNP antara lain:

- 1) Standar Isi
- 2) Standar Proses
- 3) Standar Kompetensi Lulusan
- 4) Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 5) Standar Sarana dan Prasarana
- 6) Standar Pengelolaan
- 7) Standar Pembiayaan
- 8) Standar Penilaian⁸

Faktor pertama yang mempengaruhi mutu pendidikan yaitu guru profesional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional

⁵Rgi/Ad, Belum memiliki akreditasi, 611 sekolah tak bisa laksanakan UN (<http://www.riau.go.id/home/content/2014/03/12/1344-belum-miliki-akreditasi-611-sekolah-tak-bisa-laksanakan>) di akses pada tanggal 12 April 2015 pukul 22.13

⁶ Indra Bastian, *Akuntansi Pendidikan* (Jakarta : Erlangga, 2006), p.193

⁷ Abdul hadis dan Nurhayati, *Manajemen Mutu Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), p. 3

⁸ http://bsnp-indonesia.org/id/?page_id=61 diakses pada tanggal 10 April 2015 pukul 13.16

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Secara struktural, kedudukan guru memiliki peranan yang sangat sentral, dapat dikatakan bahwa guru merupakan tulang punggung pendidikan. Kualitas seorang guru terhadap mutu pendidikan yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru yang diberikan kepada anak didiknya yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas kelulusan, baik dalam kualitas pribadi, moral, pengetahuan mampu kompetensi kerja.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 membahas tentang standar kualifikasi dan kompetensi guru dimana disebutkan bahwa setiap guru wajib memenuhi standar kualitas akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional, juga bahwa guru-guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik diploma empat (D-IV) atau sarjana akan diatur dengan peraturan menteri tersendiri, yaitu: Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi, Guru pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu,

dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi, dan Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

Pada tahun 2013 dari sisi kualifikasi pendidikan, hingga saat ini dari 2,92 juta guru, baru sekitar 51 persen yang berpendidikan S-1 atau lebih, sedangkan sisanya belum berpendidikan S-1. Begitu pun dari persyaratan sertifikasi hanya 2,06 juta guru atau sekitar 70,5 persen guru yang memenuhi syarat. Sedangkan 861.67 guru lainnya belum memenuhi syarat sertifikasi, yakni sertifikat yang menunjukkan guru tersebut profesional.⁹

Faktor kedua yang mempengaruhi mutu pendidikan yaitu kurikulum. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Bab I pasal 1 ayat 19 berbunyi: Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Kurikulum yang pernah diberlakukan di Indonesia, mulai dari kurikulum tahun 1975, 1984, 1994, dan pembaharuan kurikulum di tahun 2004

⁹Jimmy Ayal, *Kemendikbud akui Kualitas guru masih rendah* (<http://www.antarane.ws.com/berita/397722/kemdikbud-akui-kualitas-guru-masih-rendah>) diakses pada tanggal 12 April 2015 pukul 23.39

(KBK) tidak dapat membuat Indonesia dengan hasil yang baik.¹⁰ Pelaksanaan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang di dalamnya terdapat pembelajaran materi muatan lokal dan materi pengembangan diri tidak mencerminkan hasil proses yang diharapkan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi mutu pendidikan yaitu fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan di Indonesia, terutama di daerah pelosok Indonesia sangat tidak memadai. Kurangnya sarana dan prasarana meliputi gedung sekolah beserta isinya, serta peralatan sekolah yang menunjang proses belajar mengajar di suatu sekolah, atau lembaga tempat belajar. Sering kita lihat pembangunan gedung-gedung sekolah megah diperkotaan dengan fasilitas yang memadai untuk kegiatan belajar mengajar. Namun hal itu akan berbanding terbalik ketika kita melihat keadaan yang sebenarnya di daerah terpencil. Tidak ada fasilitas yang cukup memadai untuk menunjang kemajuan proses belajar mengajar yang mereka lakukan.¹¹Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010/2011 ruang kelas SMA yang rusak mencapai 3.904 dari total 111.387 ruang kelas.

Administrasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan hal yang sangat menunjang bagi tercapainya tujuan dari pendidikan. Proses belajar mengajar akan semakin sukses bila sarana dan prasarana pendidikan memadai. Untuk itu sarana dan prasarana pendidikan harus selalu

¹⁰Aam Amaliyanti, *Perubahan Kurikulum* (<http://megasiana.com/pedulipendidikan/perubahan-kurikulum/>) diakses pada tanggal 11 April 2015 pukul 16.06

¹¹Nur Yati, *Daerah Terpencil yang Masih Kurang Akan Fasilitas Pendidikan* (<http://edukasi.kompasiana.com/2014/04/29/daerah-terpencil-yang-masih-kurang-akan-fasilitas-pendidikan-652523.html>) diakses pada tanggal 11 April 2015 pukul 16.21

lengkapi. Pemerintah selalu berupaya untuk secara terus menerus melengkapi sarana dan prasarana pendidikan bagi seluruh jenjang dan tingkat pendidikan. Menurut analisis ekonomi, sektor pendidikan tetap tertutup untuk investasi asing karena UU No 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memungkinkan masuknya investasi asing. Menurut Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan dianggap sebagai kegiatan non-profit. Jadi investasi asing tidak bisa masuk ke sektor ini, kecuali Undang-Undangnya diubah. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.

Faktor keempat yang mempengaruhi mutu pendidikan yaitu kepala sekolah. Pada tingkat operasional Kepala Sekolah adalah orang yang berada di garis terdepan yang mengkoordinasikan upaya meningkatkan pembelajaran yang bermutu. Kepala Sekolah diangkat untuk menduduki jabatan bertanggung jawab mengkoordinasikan upaya bersama mencapai tujuan pendidikan pada level sekolah yang dipimpin. Tentu saja Kepala Sekolah bukan satu-satunya yang bertanggung jawab penuh terhadap suatu sekolah, karena masih banyak faktor lain yang perlu diperhitungkan seperti: guru, peserta didik, dan lingkungan yang mempengaruhi proses pembelajaran. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah telah ditetapkan bahwa ada 5 (lima) dimensi kompetensi yaitu: Kepribadian, Manajerial,

Kewirausahaan, Supervisi dan Sosial. Kepala Sekolah diharapkan mampu melaksanakan fungsinya baik sebagai manajer dan leader.

Nyatanya penghambat tercapainya kualitas keprofesionalan kepemimpinan kepala sekolah seperti proses pengangkatannya tidak transparan, rendahnya mental kepala sekolah yang ditandai dengan kurangnya motivasi dan semangat serta kurangnya disiplin dalam melakukan tugas, dan seringnya datang terlambat, wawasan kepala sekolah yang masih sempit, serta banyak faktor penghambat lainnya yang menghambat tumbuhnya kepala sekolah yang professional untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ini mengimplikasikan rendahnya produktivitas kerja kepala sekolah yang berimplikasi juga pada mutu (input, proses, dan output).

Dan faktor terakhir yang mempengaruhi mutu pendidikan yaitu biaya pendidikan. Seiring dengan meningkatnya harga-harga barang yang berarti turunnya nilai uang rupanya juga sangat berpengaruh pada dunia pendidikan. Biaya pendidikan pada masing-masing sekolah dan perguruan tinggi jumlahnya bervariasi, namun kenaikan biaya pendidikan merupakan hal yang pasti. Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah. Untuk masuk TK dan SDN saja saat ini

dibutuhkan biaya Rp 500.000,- sampai Rp 1.000.000. Bahkan ada yang memungut di atas Rp 1 juta. Masuk SMP/SMA bisa mencapai Rp 1 juta sampai Rp 5 juta.¹²

Walaupun pada saat ini sekolah sudah mendapat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), namun masih kurang untuk memenuhi biaya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Bahkan program BOS dari pemerintah tidak berjalan dengan baik dan masih terdapat sekolah yang melakukan pungutan kepada siswa.¹³ Dengan adanya dana BOS, tetapi siswa masih harus membeli berbagai buku dan keperluan tambahan untuk sekolah. Selain itu, terkadang siswa masih harus mengeluarkan uang untuk mengikuti les, dan lain-lain.

Melihat penjelasan mengenai mutu pendidikan sekolah menengah atas di Indonesia, banyak faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, peneliti akan mengadakan penelitian mengenai Pengaruh Fasilitas Pendidikan dan Guru Profesional Terhadap Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang mempengaruhi mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

¹²Risa Untari, *Mahalnya Biaya Pendidikan di Indonesia* (<http://edukasi.kompasiana.com/2014/08/13/mahalnya-biaya-pendidikan-di-indonesia-679894.html>) di akses pada tanggal 12 April 2015 pukul 19.35

¹³Saroh Ganik Haryati, *Wajah Buruk Pendidikan di Indonesia* (<http://edukasi.kompasiana.com/2012/12/21/wajah-buruk-pendidikan-di-indonesia-518560.html>) diakses pada tanggal 12 April 2015 pukul 23.51

1. Apakah terdapat pengaruh kurikulum terhadap mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh fasilitas pendidikan terhadap mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh guru profesional terhadap mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas di Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh biaya pendidikan terhadap mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas di Indonesia?
5. Apakah terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas di Indonesia?
6. Apakah terdapat pengaruh fasilitas pendidikan dan guru profesional terhadap mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas di Indonesia?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka diketahui masalah mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas di Indonesia pergerakan disebabkan oleh banyak faktor yang luas. Berhubung keterbatasan yang dimiliki peneliti maka penelitian ini dibatasi hanya pada masalah: “Pengaruh Fasilitas Pendidikan dan Guru Profesional terhadap Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Indonesia Tahun 2010-2014”.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh fasilitas pendidikan terhadap mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh guru profesional terhadap mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh fasilitas pendidikan dan guru profesional terhadap mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas di Indonesia?

E. Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dan menambah referensi informasi serta khasanah ilmu tentang fasilitas pendidikan, guru profesional, dan mutu pendidikan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti lainnya jika akan melakukan penelitian yang terkait dengan mutu pendidikan, fasilitas pendidikan, maupun guru profesional.

BAB II

KAJIAN TEORETIK

A. Deskripsi Konseptual

Teori-teori mengenai Mutu Pendidikan sebagai variabel Y, Fasilitas Pendidikan sebagai variabel X_1 dan Guru Profesional sebagai variabel X_2 akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Hakekat Mutu Pendidikan

a. Pengertian Mutu Pendidikan

Secara umum, mutu atau kualitas adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari suatu barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Menurut Galvin dalam buku Nasution mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan produk, manusia atau tenaga kerja, proses dan tugas serta lingkungan yang memenuhi harapan pelanggan.¹⁴ dalam konteks pendidikan, pengertian kualitas mencakup input, proses, dan output pendidikan.

Joseph Juran dalam buku Uhar Suharsaputra mendefinisikan mutu adalah kesesuaian untuk penggunaan (*fitness for use*), berarti bahwa suatu

¹⁴ Nasution, NM, *Total Quality Manajemen*, (Jakarta: Bina Aksara, 2001), p. 16

produk atau jasa hendaklah sesuai dengan apa yang diperlukan atau diharapkan oleh pengguna.¹⁵

Sedangkan menurut Philip B. Crosby dalam buku Abdul Hadis dan Nurhayati, mutu ialah *conformance to requirement*, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki mutu apabila sesuai dengan standar kriteria mutu yang telah ditentukan, standar mutu tersebut meliputi bahan baku, proses produksi dan produksi jadi.¹⁶

Mutu dalam pandangan Umaedi dapat diartikan sebagai “Derajat keunggulan suatu barang atau jasa dibandingkan dengan yang lain.”¹⁷ Pengertian ini berarti ada dua atau lebih barang yang dibandingkan dengan karakter yang sama dilihat perbedaannya dan dinilai.

Berdasarkan pengertian tentang mutu secara umum di atas, maka mutu adalah suatu derajat keunggulan dari suatu produk, jasa atau hasil kerja melalui proses yang dinilai melalui standar yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Sedangkan pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.¹⁸

Kualitas ditentukan sejauh mana ia memuaskan pemenuhan kebutuhan dan keinginan mereka atau bahkan melebihi. Kepuasan dan keinginan adalah suatu konsep yang abstrak maka pengertian kualitas, dalam hal ini disebut “kualitas dalam persepsi”, sementara kualitas yang diukur

¹⁵Uhar Suharsaputra, *Administrasi Pendidikan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), p. 248

¹⁶Abdul Hadis dan Nurhayati, *op. cit.*, p. 85

¹⁷Umaedi, Hardiyanto dan Siswantari, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), p. 4.15

¹⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Pendidikan (<http://kbbi.web.id/didik>) diakses pada tanggal 23 September 2014 pukul 20.00

berdasarkan spesifikasi (standar) yang telah ditetapkan sering disebut kualitas dalam fakta atau kenyataan.

Mutu pendidikan menurut Dzaujuk Ahmad adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut berdasarkan norma atau standar yang berlaku.¹⁹

Mutu pendidikan mempunyai arti luas meliputi berbagai masukan (input), proses belajar mengajar dan hasil.²⁰

Menurut Feigenbaum dalam buku Abdul Hadis dan Nurhayati, mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (*full customer satisfaction*).²¹ Pengertian ini berarti suatu produk dianggap bermutu apabila dapat memberikan kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, sesuai dengan harapan konsumen atas produk yang dihasilkan.

Menurut Sallis, terdapat konsep mutu dalam tiga pengertian. Pertama, mutu sebagai konsep absolut (mutlak). Kedua, mutu dalam konsep yang relatif. Ketiga, mutu menurut konsumen.²² Dalam percakapan sehari-hari mengenai mutu yang terutama digunakan adalah konsep absolut, misalnya, untuk menggambarkan restoran mahal atau mobil mewah. Dalam konteks ini, mutu sama seperti hakikat kebaikan, kecantikan, dan kebenaran, yang mengacu pada suatu entitas yang ideal, sempurna dan tanpa bandingan. Karakteristik yang utama adalah kelangkaan dan kemahalan atau harga

¹⁹ Dzaujuk Ahmad, *Penunjuk Peningkatan Mutu pendidikan di sekolah Dasar* (Jakarta: Depdikbud, 1996), p. 8

²⁰ Nanang Fattah, "Analisis Hubungan Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Mutu Proses dan Hasil Belajar", *Jurnal Pendidikan*, No. 3/XVIII/1999

²¹ Abdul Hadis dan Nurhayati, *Loc. Cit.*

²² Edward Sallis, *Total Quality Management In Education, Manajemen Mutu Pendidikan* (Yogyakarta: IRCISoD, 2006), p. 51

tinggi, sehingga seperti yang dikatakan Pfeffer dan Coote dalam Sallis, “Mayoritas kita memujinya, menginginkannya, namun sebagian kecil di antara kita yang dapat memilikinya.”²³ Jika dikaitkan dengan konteks pendidikan, maka konsep pendidikan adalah elit, karena hanya sedikit satuan pendidikan yang dapat memberikan pengalaman pendidikan dengan mutu tinggi kepada peserta didik. Hal ini juga menunjukkan bahwa meraih mutu adalah hasil dari upaya yang memperlihatkan standar-standar tertinggi.

Sebagai konsep yang relatif, mutu ditentukan sebelum atau setelah suatu barang diproduksi atau jasa diberikan. Barang atau jasa dikatakan bermutu apabila memenuhi harapan produsen (pemberi jasa) atau harapan konsumen. Terdapat dua aspek dari mutu relatif, yaitu mutu yang mendasar pada standar, dan mutu yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Aspek pertama menunjukkan bahwa mutu diukur dan dinilai berdasarkan persyaratan kriteria dan spesifikasi (standar-standar) yang telah ditetapkan lebih dulu. Pemenuhan standar ini ditunjukkan oleh produsen secara konsisten sehingga hasilnya (produk maupun jasa) tetap sesuai spesifikasi yang ditetapkan. Aspek yang kedua, konsep ini juga mengakomodasi keinginan konsumen atau pelanggan, sebab di dalam penetapan standar (persyaratan, kriteria, dan spesifikasi) produk atau jasa yang dihasilkan memperhatikan syarat-syarat yang dikehendaki pelanggan. Perubahan-perubahan standar antara lain juga didasarkan atas keinginan dan

²³*Ibid*, p. 52

pemenuhan kebutuhan pelanggan, bukan semata-mata kehendak produsen. Oleh karena itu, produk atau jasa yang dihasilkan akan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Dengan memperhatikan dua aspek konsep relatif dari mutu tersebut, menunjukkan bahwa standar bersifat dinamis, dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan lingkungan yang terjadi.

Mutu pendidikan tidak mudah dirumuskan dan disepakati karena beberapa alasan. Pendidikan sebagai suatu bentuk jasa (*service*) memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari barang. Pada prinsipnya mutu pendidikan menyangkut seluruh komponen dan kegiatan sistem pendidikan (sekolah), baik masukan utama, masukan instrumental, masukan lingkungan, proses transformasi maupun keluaran. Dalam konteks ini “persepsi pengelola, pelaksana, pengguna jasa dan keluaran pendidikan sangat heterogen dan tidak mempunyai kriteria yang sama mengenai mutu pendidikan.”²⁴

Hal ini sejalan dengan pendapat Amri, bahwa antara input, proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling berhubungan. Akan tetapi agar proses yang baik itu tidak salah arah, maka mutu dalam artian hasil (output) harus dirumuskan lebih dahulu oleh sekolah, dan harus jelas target yang harus dicapai untuk setiap tahun atau kurun waktu lainnya. Berbagai

²⁴*Ibid*, p.32

input dan proses harus selalu mengacu pada mutu hasil (output) yang ingin dicapai.²⁵

Upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan nasional oleh pemerintah selalu dilakukan secara bertahap, terencana dan terukur. Salah satu dasar hukum tentang hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB XVII Bagian Kedua Pasal 60 tentang Akreditasi.

Latar belakang adanya kebijakan akreditasi sekolah di Indonesia adalah bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, maka setiap satuan/program dan/atau satuan pendidikan harus memenuhi atau melampaui standar yang dilakukan melalui kegiatan akreditasi terhadap kelayakan setiap satuan/program pendidikan.

Secara konsep, tujuan diselenggarakannya akreditasi sekolah/madrasah ialah:

- 1) Memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah atau program yang dilaksanakannya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
- 2) Memberikan pengakuan peringkat kelayakan;
- 3) Memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait.²⁶

²⁵Sofan Amri, *Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah Dalam Teori, Konsep dan Analisis* (Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2013), p.290

Berdasarkan pengertian dan konsep tentang mutu pendidikan yang telah dijelaskan, maka mutu pendidikan adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia atau tenaga kerja, proses dan tugas serta lingkungan yang memenuhi harapan peserta didik. Secara operasional dinyatakan bahwa variabel mutu pendidikan ditinjau dari rata-rata nilai akreditasi sekolah di Indonesia.

2. Hakikat Fasilitas Pendidikan

a. Pengertian Fasilitas Pendidikan

Mutu pendidikan atau hasil belajar siswa dapat ditingkatkan apabila didukung dengan fasilitas yang baik yang dimiliki sekolah yang bersangkutan. Dimana yang dimaksud dengan fasilitas menurut Suharsimi Arikunto ialah Segala sesuatu yang dapat memudahkan pelaksanaan kegiatan tertentu atau fasilitas dalam proses belajar mengajar akan mempermudah berlangsungnya kegiatan belajar mengajar.²⁷

Serta menurut Syaiful Bahri Djamarah, fasilitas sebagai kelengkapan yang menunjang belajar anak didik di sekolah, dimana lengkap atau tidaknya fasilitas belajar akan mempengaruhi pemilihan metode mengajar guru.²⁸ Sebagai contoh bila di kelas terdapat layar proyektor atau LCD, maka guru dapat dengan mudah menyampaikan pembelajaran dengan metode ceramah atau presentasi siswa.

²⁶Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, *Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah*, (Jakarta: BAN S/M, 2009), p.6

²⁷Suharsimi Arikunto, *Pengelolaan Materiil*, (Jakarta: Primakarya, 1987), p.5

²⁸Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), p.81

Lebih lanjut Muktar, Rusmini dan Samsu berpendapat bahwa “Fasilitas sekolah adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk terlaksananya kegiatan pembelajaran dan kegiatan penunjangnya”.²⁹

Dari beberapa pendapat yang dirumuskan oleh para ahli mengenai pengertian fasilitas di atas, maka dapat dirumuskan pengertian fasilitas pendidikan berarti segala sesuatu yang bersifat fisik maupun material, yang dapat memudahkan terselenggaranya kegiatan atau proses belajar mengajar di sekolah, misalnya dengan tersedianya tempat perlengkapan belajar di kelas, alat-alat peraga pengajaran, buku pelajaran, perpustakaan, berbagai perlengkapan praktikum laboratorium dan segala sesuatu yang menunjang terlaksananya proses belajar mengajar.

Adapun fasilitas pendidikan yang menunjang kegiatan belajar mengajar mencakup sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana mempunyai arti yang luas, banyak para ahli yang menjelaskan tentang definisi dari sarana dan prasarana menurut pendapat masing-masing. Menurut kamus besar bahasa Indonesia dikatakan perbedaan dari sarana dan prasarana yaitu sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, sedangkan prasarana adalah penunjang terselenggarakannya suatu proses.

Menurut Ibrahim Bafadal, berpendapat bahwa sarana prasarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang

²⁹Muktar, Rusmini dan Samsu, *Sekolah Berprestasi*, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 2005), p.121

secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah.³⁰

Sedangkan menurut E. Mulyasa, yang dimaksud dengan sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Adapun yang dimaksud prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran.³¹

Dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan adalah sebagai proses perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, penataan, penggunaan, pemeliharaan dalam rangka untuk menunjang proses pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Dasar hukum sarana dan prasarana di sekolah secara hierarkis dapat dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 45 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatakan “Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan

³⁰Ibrahim Bafadal, *Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasinya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), p.2

³¹E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. 2, p.49

perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik”.

Ditinjau dari jenisnya yaitu fasilitas pendidikan dapat dibedakan menjadi fasilitas fisik dan fasilitas non fisik, yaitu:

- 1) Fasilitas fisik atau fasilitas material yaitu segala sesuatu yang berwujud benda mati atau dibendakan yang mempunyai peran untuk memudahkan atau melancarkan sesuatu usaha, seperti kendaraan, mesin tulis, komputer, perabot, alat peraga, alat peraga, model, media, dan sebagainya.
- 2) Fasilitas non fisik yakni sesuatu yang bukan benda mati, atau kurang dapat disebut benda atau dibendakan, yang mempunyai peranan untuk memudahkan atau melancarkan sesuatu usaha seperti manusia, jasa, uang.³²

Sehubungan dengan sarana pendidikan, menurut Nawawi mengklasifikasikannya menjadi beberapa macam sarana pendidikan, yaitu ditinjau dari sudut:

a. Ditinjau dari habis tidaknya dipakai

Dalam tinjauan ini sarana dapat dibagi menjadi dua macam:

1) Sarana pendidikan yang habis pakai

Sarana pendidikan yang habis pakai adalah segala bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relative singkat

³² Alisuf Sabri, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1998), p. 35-36

contohnya adalah kapur tulis yang bisa digunakan oleh guru dan siswa dalam pembelajaran.

2) Sarana pendidikan yang tidak tahan lama

Sarana pendidikan yang tahan lama adalah keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama. Sebagai contohnya adalah bangku sekolah, media tulis, atlas, globe, dan beberapa peralatan olahraga.

b. Ditinjau dari bergerak tidaknya saat digunakan

1) Sarana pendidikan yang bergerak

Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Contohnya lemari arsip sekolah.

2) Sarana pendidikan yang tidak bisa bergerak

Sarana pendidikan yang tidak bisa bergerak adalah semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relative sangat sulit dipindahkan. Contohnya suatu sekolah yang telah memiliki saluran dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

c. Ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar

Dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar, ada dua jenis sarana pendidikan. Pertama, sarana pendidikan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar. Contohnya kapur tulis, atlas, dan sebagainya. Kedua, sarana pendidikan yang secara tidak langsung

digunakan dalam proses belajar mengajar, seperti lemari arsip dikantor sekolah.³³

Sedangkan jenis prasarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi dua macam. Pertama, prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan dan ruang laboratorium. Kedua, prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, sebagai contohnya adalah ruang kantor, kantin, tanah, jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang usaha kesehatan sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan.³⁴

Ditinjau dari fungsinya terhadap PBM, prasarana pendidikan berfungsi tidak langsung (kehadirannya tidak sangat menentukan). Termasuk dalam prasarana pendidikan adalah tanah, halaman, pagar, tanaman, gedung/bangunan sekolah, jaringan jalanan, air, listrik, telepon, serta perabot/mebiler. Sedangkan sarana pendidikan berfungsi langsung (kehadirannya sangat menentukan) terhadap PBM, seperti alat pelajaran, alat peraga, alat praktek dan media pendidikan.³⁵

Jika ditinjau dari sifat barangnya yaitu benda-benda pendidikan dapat dibedakan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak, yang kesemuanya dapat mendukung pelaksanaan tugas, yaitu:

³³Barnawi & M. Arifin, *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), p.50

³⁴Barnawi & M. Arifin, *Op.cit*, p.51

³⁵Ary H. Gunawan, *Administrasi Sekolah Administrasi Pendidikan Mikro*, (Jakarta: Rienka Cipta, 2011) Cet.2 p.115

- a. Barang bergerak atau berpindah atau dipindahkan dikelompokkan menjadi barang habis pakai dan barang tak habis pakai.
- b. Barang tidak bergerak ialah yang tidak berpindah-pindah letaknya atau tidak bisa dipindahkan, seperti tanah, bangunan atau gedung, sumur, menara air, dan sebagainya.³⁶

Sekolah harus mampu mengelola segala fasilitas yang diperlukan dalam upaya menunjang terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan, dengan menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Perencanaan dan analisis kebutuhan yaitu merinci rancangan pembelian, rehabilitasi, distribusi, dan pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Penganggaran, yaitu menentukan perincian dan yang diperlukan serta menetapkan program prioritas sesuai dana yang diperlukan.
- 3) Pengadaan, yaitu upaya sekolah dalam memenuhi kebutuhan fasilitas sebagaimana yang telah dirumuskan pada tahap perencanaan dan penganggaran.
- 4) Penyimpanan dan penyaluran, yaitu upaya mengatur persediaan fasilitas diruang penyimpanan serta bagaimana menyalurkan ketempat pemakaian.
- 5) Pemeliharaan, yaitu upaya untuk mengusahakan agar kondisi fasilitas yang tersedia dalam kondisi baik, dengan cara merawat dan merehabilitasi.

³⁶*Ibid*, p.115

- 6) Inventarisasi, yaitu upaya mencatat dan menyusun daftar inventaris fasilitas yang tersedia.
- 7) Penghapusan, yaitu menghapus daftar inventaris barang-barang yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi, sesuai dengan peraturan yang ada.³⁷

Distribusi/ penyebaran sekolah termasuk Sekolah Menengah Atas di kota-kota besar sering menjadi masalah karena ada pengelompokan daerah-daerah tertentu atau penyebaran tidak merata yang terkait dengan jumlah penduduk usia sekolah 15-17 tahun di daerah tersebut. Hal ini juga terjadi diberbagai daerah karena ketidakseimbangan jumlah sekolah menengah atas dengan jumlah memanfaatkan fasilitas sekolah antar daerah yang satu dengan daerah yang lain.

Mengingat jumlah fasilitas sekolah antar daerah satu dengan daerah yang lainnya berbeda, sehingga jumlah pemanfaatan fasilitas sekolah juga berbeda. Hal ini disebabkan karena jumlah sekolah berbeda, keadaan ekonomi keluarga, sarana dan prasarana serta jarak.

Dari pemaparan uraian teori-teori diatas, dapat disimpulkan bahwa fasilitas pendidikan merupakan semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Dalam penelitian ini variabel fasilitas pendidikan dapat diukur dengan jumlah sekolah.

³⁷Wahyu Sri Ambar Arum, *Manajemen Sarana dan Prasarana* (Jakarta: Multi Karya Mulya, 2007) p.6

3. Hakikat Guru Profesional

a. Pengertian Guru Profesional

Menurut Webster dalam Kunandar Profesional berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif.³⁸

Pengertian ini berarti bahwa profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu, suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, tetapi memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus. Hal senada juga diungkapkan oleh Djama'an satori dkk dalam Fachruddin Saudagar dan Ali Idrus profesi ialah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari seseorang.³⁹

Jarvis dalam Fachruddin Saudagar dan Ali Idrus mengartikan bahwa profesi adalah seseorang yang melakukan tugas profesi juga sebagai seorang yang ahli (*expert*).⁴⁰ Menurut Sikun Pribadi dalam Fachruddin Saudagar dan Ali Idrus profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau janji terbuka bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan.⁴¹ Profesi seseorang yang mendalami hukum adalah ahli hukum seperti jaksa, hakim dan pengacara, profesi

³⁸Kunandar, *Guru Profesional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), p. 45

³⁹Fachruddin Saudagar dan Ali Idrus, *Pengembangan Profesionalitas Guru* (Jakarta: GP Press, 2009), p.2

⁴⁰Ibid, p. 3

⁴¹Ibid

seseorang yang mendalami keperawatan adalah perawat. Sementara itu, seseorang yang menggeluti dini pendidikan (mendidik dan mengajar) adalah guru.

Menurut Syaiful Bahri dalam buku *Guru dan Anak*:

“Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Sedangkan dalam pandangan masyarakat guru adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti dilembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di mesjid, musala, rumah, dan sebagainya.”⁴²

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menyatakan bahwa:

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah. Guru sebagai pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional.”⁴³

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa guru adalah orang yang melaksanakan pendidikan berupa mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik baik melalui jalur pendidikan formal maupun pendidikan informal.

Sejalan dengan pendapat Nana Sudjana pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka

⁴²Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), p. 31

⁴³Peraturan Pemerintah RI Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2005), p. 2

yang khusus dipersiapkan untuk itu, dan buka pekerjaan yang dilakukan oleh mereka karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain.⁴⁴

Menurut Yamin, profesi mempunyai pengertian seseorang yang menekuni pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan, teknik, dan prosedur berlandaskan intelektualitas.⁴⁵

Menurut T. Hooghiemstra yang dikutip oleh Ondi dan Aris, menjelaskan bahwa “seorang yang dikatakan profesional adalah mereka yang sangat kompeten atau memiliki kompetensi-kompetensi tertentu yang mendasari kinerja.”⁴⁶

Uzer Usman memberikan suatu kesimpulan bahwa suatu pekerjaan yang bersifat profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum. Kata ‘profesional’ itu sendiri berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru.⁴⁷

Menurut Kunandar guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya.⁴⁸ Sedangkan Oemar Hamalik mengemukakan bahwa guru profesional merupakan orang yang telah menempuh program pendidikan guru dan memiliki tingkat master serta telah mendapat ijazah negara dan telah berpengalaman dalam mengajar pada kelas-kelas besar.⁴⁹

⁴⁴ Kunandar, *op. cit.*, p. 46

⁴⁵ Martinis Yamin, *Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), p. 3

⁴⁶ Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), p. 29

⁴⁷ Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), p.14

⁴⁸ Kunandar, *op. cit.*, p. 46

⁴⁹ Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), p. 27

Menurut UU No.19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 28 ayat (3), Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Seperti yang terurai di bawah ini yaitu:

1) Kompetensi pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

2) Kompetensi kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

3) Kompetensi profesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

4) Kompetensi sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan

peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

Pasal yang menyatakannya adalah Pasal 8: Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal lainnya adalah Pasal 11, ayat (1) menyebutkan bahwa sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.

Menurut Martinis Yamin, sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.⁵⁰

Menurut Mansur Muslich, sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.⁵¹

⁵⁰Martinis Yamin, *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*, (Jakarta: Gaung Persada Perss, 2009), p. 2

⁵¹Mansur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), p. 2

Dari beberapa komponen yang ditetapkan pemerintah untuk mencapai standar minimal hasil/prestasi pendidikan secara nasional maka standar tenaga pendidikan mendapatkan perhatian lebih dibandingkan standar-standar lain. Namun demikian bukan berarti standar lain seperti standar proses, isi, sarpas, kinerja penilaian, standar kelulusan, dsb. Sebab kedelapan standar pelaksana pendidikan itu merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaannya. Untuk standar tenaga pendidikan (guru) ditetapkan juga harus minimal strata satu (S1) atau diploma (D4) dan tahun 2015 semua guru sudah bergelar S1/D4. Ini karena UU guru dan dosen memerintahkan secara jelas. Ditetapkan juga standar yang harus dimiliki guru sebagai jabatan profesi. Guru sebagai profesi harus menguasai atau memenuhi empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, professional, sosial dan kepribadian.

Setelah pemerintah melaksanakan serangkaian program untuk peningkatan mutu guru dan kesejahteraan melalui pemberian tunjangan profesi yang sebesar 1x gaji pokok, maka juga logis kalau pemerintah ingin mengetahui bagaimana kompetensi guru di sekolah-sekolah dan implikasinya terhadap prestasi siswa. Kemudian kemendikbud mengevaluasi kompetensi guru melalui Uji Kompetensi Guru (UKG). Setelah dilaksanakan UKG hasil ternyata kurang dari yang diharapkan semua pihak.

Dalam Bab IV pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 ayat (1) mengatakan bahwa: “Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam

pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”.

Uji Kompetensi Guru (UKG) adalah suatu cara untuk mengukur kemampuan para guru sekaligus mencari kelemahan yang dimiliki para guru tersebut sebagai tenaga pendidik dalam upaya meningkatkan mutu dunia pendidikan. Sasaran UKG semua guru Republik Indonesia. Program UKG sudah tentu memiliki tujuan yang sangat baik dan besar manfaatnya bagi guru maupun pemerintah, hanya tindak lanjut hasil UKG mesti harus ada.⁵²

Fungsi dari pelaksanaan uji kompetensi guru tersebut adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan tindak lanjut dari uji kompetensi guru tersebut, yaitu berupa diklat sesuai dengan nilai hasil ujian dan disesuaikan dengan tabel standar penilaian. Adapun peserta uji kompetensi guru tersebut adalah seluruh guru-guru tingkat dasar dan menengah, mulai dari guru SD, SMP, SMU, SMK dan sederajatnya.

Menurut E. Mulyasa pengertian sertifikasi adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik.⁵³ Sedangkan Kunandar menyatakan bahwa sertifikasi profesi guru adalah proses untuk memberikan sertifikat kepada guru yang telah memenuhi

⁵²Novaliendry Dony, “Sistem Pendukung Keputusan uji Kompetensi Guru Kasus Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat (LPMP SUMBAR)”, Jurnal Teknologi Informasi & Pendidikan Vol. 1 No. 1 Maret 2010, Sumatera Barat: Universitas Negeri Padang, 2010

⁵³E.Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 2008), p. 34

standar kualifikasi dan standar kompetensi.⁵⁴ Sehingga dapat disimpulkan bahwa sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar sebagai bukti atau pengakuan atas kemampuan profesionalnya sebagai tenaga pendidik.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa profesional guru merupakan sikap dari diri seorang guru profesional dalam menjalankan aktivitas dan tanggung jawab profesinya di bidang pendidikan dan pengajaran, sehingga dapat memberikan layanan yang baik bagi masyarakat dan terbukti dari sertifikasi yang dimiliki. Dalam penelitian ini variabel profesional guru dapat diukur dengan jumlah guru yang telah tersertifikasi.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

- 1) Nanang Fatah dalam penelitiannya yang berjudul analisis hubungan pembiayaan pendidikan sekolah dasar dengan mutu proses dan hasil belajar. Biaya pendidikan berpengaruh terhadap mutu pendidikan di perkotaan dan pedesaan. Pada perkotaan komponen biaya signifikan dan dominan terhadap mutu hasil belajar (1) sarana kelas ($r=0,35$), (2) sarana sekolah ($r=0,35$). Pada pedesaan biaya signifikan dan dominan terhadap mutu hasil belajar adalah gaji/kesejahteraan pegawai ($r=0,38$) dan pembinaan guru ($r=0,39$) menggunakan model *fixed effect*.
- 2) Yenni Arnas dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh profesionalisme dan sarana prasarana terhadap kualitas pelayanan pada

⁵⁴Kunandar, *op. cit.*, p. 79

sekolah tinggi penerbangan Indonesia. Terdapat pengaruh positif dan signifikan profesionalisme dan sarana prasarana secara bersama-sama terhadap kualitas pelayanan, yang menunjukkan oleh nilai koefisien korelasi $r = 0,875$. Melalui uji signifikansi dengan menggunakan distribusi F diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 130,664. Sedangkan harga kritis nilai F_{tabel} dengan derajat kebebasan pembilangan 2 dan penyebut 83 pada $\alpha (0,05)$ adalah sebesar 3,44 sehingga terbukti bahwa $F_{hitung} (130,664) > F_{tabel} (3,44)$ menggunakan model *fixed effect*. Dengan demikian pengaruh profesionalisme dan sarana prasarana secara bersama-sama dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

- 3) Paulus Yulius Indubri, *et al* dalam penelitiannya yang berjudul Manajemen Pendidikan Sekolah dan Kualitas Pendidikan (Studi pada Kualitas Pendidikan di Provinsi Papua) Berdasarkan hasil Uji Analisis Jalur P ($X_1 \rightarrow Y_2$) Hubungan kausalitas antara variabel profesional guru (X_1) terhadap kualitas pendidikan (Y_2) dengan *loading factor* (2λ) sebesar 0.343 signifikan 0.000 atau ($p < 0.05$) menggunakan model *fixed effect*. Dengan demikian hubungan antara profesional guru (X_1) mempunyai pengaruh langsung secara signifikan terhadap kualitas pendidikan (Y_1).

C. Kerangka Teoretik

1. Pengaruh Fasilitas Pendidikan (X_1) terhadap Mutu Pendidikan (Y)

Menurut Bafadal, ada lima komponen yang menentukan mutu pendidikan yaitu: (1) kegiatan belajar-mengajar, (2) manajemen pendidikan yang efektif dan efisien, (3) buku dan sarana prasarana belajar yang memadai dan selalu dalam kondisi siap pakai, (4) fisik dan penampilan sekolah yang baik, (5) partisipasi aktif masyarakat.⁵⁵

Salah satu program pemerintah yang sedang dilaksanakan sekarang adalah meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. Salah satu yang harus dilakukan dalam meningkatkan mutu adalah dengan cara tersedia fasilitas yang memadai. Menurut Engkoswara bahwa “Fasilitas pendidikan merupakan faktor yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang berfungsi memberikan kemudahan-kemudahan baik bagi siswa, guru maupun bagi tenaga kependidikan lainnya yang berupa gedung atau ruang kelas, perumahan guru, penjaga sekolah, dan gedung laboratorium”.⁵⁶

Dari uraian di atas diduga terdapat hubungan positif antara mutu pendidikan dengan fasilitas pendidikan. Dengan perkataan lain, semakin besar fasilitas pendidikan semakin tinggi mutu pendidikan.

⁵⁵ Bafadal Ibrahim, *Manajemen Perlengkapan Sekolah: Teori dan Aplikasinya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), p.25

⁵⁶ Khairuddin, “Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dalam Peningkatan Akreditasi Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Langsa”, *Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu*; Maret 2014, P. 67

2. Pengaruh Profesional Guru (X₂) terhadap Mutu Pendidikan (Y)

Tingkat keberhasilan belajar dipengaruhi oleh keadaan sekolah dan tempat belajar, profesional guru, metode mengajarnya, kesesuaian kurikulum dengan kemampuan anak, keadaan fasilitas sekolah, keadaan ruangan, jumlah murid perkelas, pelaksanaan tata tertib sekolah dan sebagainya.⁵⁷

Menurut Roskina, Profesional guru tersebut terutama dalam kegiatan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar sehingga diharapkan guru profesional yang akan mampu mengelola pembelajaran dengan baik sehingga berimbas pada mutu pendidikan.⁵⁸

Jalal berpendapat bahwa pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada keberadaan guru yang bermutu, yaitu guru yang profesional.⁵⁹

Dari uraian di atas diduga terdapat hubungan positif antara mutu pendidikan dengan profesional. Dengan perkataan lain, makin baik guru profesional makin tinggi mutu pendidikan.

3. Pengaruh Fasilitas Pendidikan (X₁) dan Profesional Guru (X₂) terhadap Mutu Pendidikan (Y)

Heyman dan Loxley menyatakan bahwa faktor guru yang profesional, waktu belajar, manajemen sekolah, sarana dan biaya

⁵⁷Dalyono, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), p.59

⁵⁸Sitti Roskina Mas, "Profesionalitas Guru Dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran", *Inovasi*, Vol. 5, No. 2, Juni 2008, p.1

⁵⁹Fasli Jalal, "Sertifikasi Guru Untuk Mewujudkan Pendidikan Yang Bermutu", *Tesis* (Surabaya: Program Pascasarjana Unair, 2007), p. 1

pendidikan memberikan kontribusi yang berarti terhadap hasil belajar siswa.⁶⁰

Dalam perspektif makro banyak faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, yaitu: faktor kurikulum, fasilitas pendidikan, aplikasi metode, strategi dan pendekatan pendidikan yang mutakhir dan modern, biaya pendidikan yang memadai, manajemen pendidikan yang profesional, sumberdaya manusia profesional.⁶¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa fasilitas pendidikan dan profesional guru dapat mempengaruhi mutu pendidikan.

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah disusun maka diduga adanya pengaruh positif antara fasilitas pendidikan dengan mutu pendidikan dan pengaruh positif antara guru profesional terhadap mutu pendidikan.

D. Perumusan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah:

1. Terdapat pengaruh positif fasilitas pendidikan dengan mutu pendidikan di Indonesia.
2. Terdapat pengaruh positif antara guru profesional terhadap mutu pendidikan di Indonesia.
3. Terdapat pengaruh antara fasilitas pendidikan dan guru profesional terhadap mutu pendidikan di Indonesia.

⁶⁰Uhar Suharsaputra, *op. cit.*, p.280

⁶¹Abdul hadis dan Nurhayati, *op. cit.*, p. 3

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang telah peneliti rumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh fasilitas pendidikan terhadap mutu pendidikan.
- 2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh guru profesional terhadap mutu pendidikan.
- 3) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh fasilitas pendidikan dan guru profesional terhadap mutu pendidikan.

B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil data investasi pendidikan, guru profesional dan mutu pendidikan pada jenjang sekolah menengah atas dalam skala nasional. Fasilitas pendidikan diketahui berdasarkan data rata-rata fasilitas yang dikeluarkan oleh pemerintah, swasta dan rumah tangga pada tahun 2010-2014. Guru profesional diketahui berdasarkan data sertifikasi guru pada tahun 2010-2014. Mutu pendidikan diketahui berdasarkan data akreditasi nasional sekolah/madrasah tahun 2010-2014.

C. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode *Ex post Facto*. Menurut Kerlinger, penelitian *Ex post Facto* adalah pencarian empirik yang sistematis di mana peneliti tidak dapat mengendalikan variabel bebasnya karena peristiwa itu telah terjadi atau sifatnya tidak dapat dimanipulasi.⁶² Cara menerapkan metode penelitian ini adalah dengan menganalisis peristiwa-peristiwa yang terjadi dari tahun ke tahun sebelumnya untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut.

Metode ini berfungsi untuk menggambarkan dan mencari hubungan antara dua variabel atau lebih serta mengukur seberapa besar atau seberapa erat hubungan antara variabel yang diteliti. Metode ini dipilih karena sesuai dengan judul dan tujuan penelitian yaitu untuk memperoleh pengetahuan yang benar dan tepat tentang pengaruh fasilitas pendidikan dan guru profesional terhadap mutu pendidikan di Indonesia.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif, yaitu data yang telah tersedia dalam bentuk angka. Sedangkan, data yang digunakan dalam penelitian ini termasuk data panel, yaitu gabungan antara data deret waktu (*time series*) dari tahun 2010-2014 dan data silang (*cross section*). Data fasilitas pendidikan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), guru profesional diperoleh dari

⁶²Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), p. 28

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan mutu pendidikan diperoleh dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.

E. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasionalisasi variabel penelitian digunakan untuk memenuhi jenis dan indikator dari variabel-variabel terkait dalam penelitian. Selain itu, proses ini dimaksudkan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel. Sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara luas.

1. Mutu Pendidikan (Y)

a. Definisi Konseptual

Mutu pendidikan adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia atau tenaga kerja, proses dan tugas serta lingkungan yang memenuhi harapan peserta didik. Menurut hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, BAB XVII Bagian Kedua Pasal 60 tentang Akreditasi Sekolah mengatakan mutu pendidikan harus dilakukan secara bertahap, terencana dan terukur.

b. Definisi Operasional

Mutu pendidikan adalah ukuran jumlah persentase yang menggambarkan tingginya jumlah mutu pendidikan yang dilihat dari skor akreditasi sekolah A (amat baik) Nilai Akhir (NA) lebih besar dari 85 sampai dengan 100, B (baik) Nilai Akhir lebih besar dari 70 sampai dengan 85, C (cukup baik) Nilai Akhir (NA) lebih besar 56 sampai

dengan 70, dengan ketentuan kriteria status akreditasi terpenuhi. Data tersebut diambil dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) mengenai sekolah yang telah terakreditasi menurut Kabupaten/Kota di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2014.

2. Fasilitas Pendidikan (X_1)

a. Definisi Konseptual

Fasilitas Pendidikan merupakan semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Fasilitas itu sendiri berupa laboratorium, ruang kelas, kantin, kamar kecil, ruang kesehatan dan perpustakaan.

b. Definisi Operasional

Fasilitas Pendidikan adalah suatu penerimaan dari pemerintah untuk memperbaiki fasilitas sekolah yang diukur melalui rata-rata fasilitas melalui indikasi umum kebutuhan sekolah. Data tersebut diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai pembangunan fasilitas pendidikan menurut Kabupaten/Kota Provinsi di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2014.

3. Guru Profesional (X_2)

a. Definisi Konseptual

Guru Profesional adalah proses pemberian sertifikasi pendidik untuk guru dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang telah memiliki

kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) dan diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

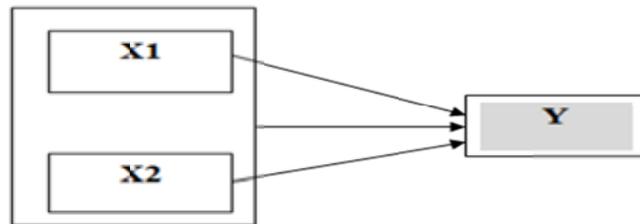
b. Definisi Operasional

Guru Profesional adalah ukuran jumlah guru yang menggambarkan tingginya jumlah sertifikasi guru termasuk dalam jumlah guru profesional yakni melalui proposi guru profesional yang tersertifikasi, yaitu mereka yang telah melewati tahapan peningkatan kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan dan program Uji Kompetensi Guru yang diambil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menurut Kabupaten/Kota di Indonesia yang diterbitkan secara berkala dari tahun 2010 sampai dengan 2014.

F. Konstelasi Hubungan Antar Variabel

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel, antara lain variabel bebas yaitu, fasilitas pendidikan dan guru profesional yang dilambangkan dengan simbol X_1 dan X_2 serta variabel terikat yaitu mutu pendidikan yang dilambangkan dengan simbol Y .

Sesuai dengan hipotesis yang diajukan bahwa terdapat pengaruh antara variabel X_1 dan X_2 terhadap variabel Y , maka konstelasi pengaruh antar variabel adalah sebagai berikut:



Keterangan :

X_1 : Variabel Bebas (Fasilitas Pendidikan)

X_2 : Variabel Bebas (Guru Profesional)

Y : Variabel Terikat (Mutu Pendidikan)

—————> : Arah Pengaruh

G. Teknik Analisis Data

1. Metode Analisis

a. Analisis Data Panel

Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi antar deret waktu (*time series*) dan kerat lintang (*cross section*). Gujarati menyatakan bahwa untuk menggambarkan data panel secara singkat, misalnya pada data *cross section*, nilai dari satu variabel atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu. Dalam data panel, unit *cross section* yang sama disurvei dalam beberapa waktu. Dalam model panel data, persamaan model dengan menggunakan data *cross section* dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} \quad ; i = 1, 2, \dots, N$$

dimana N adalah banyaknya data *cross section*

Sedangkan persamaan model dengan *time series* adalah

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \beta_2 X_t \quad ; t = 1, 2, \dots, T$$

dimana T adalah banyaknya data time-series

Mengingat data panel merupakan gabungan dari time series dan cross section, maka model dapat ditulis dengan :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \beta_2 X_{it} + \mu_{it}$$

$$i = 1, 2, \dots, N ; t = 1, 2, \dots, T$$

Keterangan :

Y = variabel mutu pendidikan

X1 = fasilitas pendidikan

X2 = guru profesional

i = cross section

t = time series

β_0 = konstanta

β_1, β_2 = koefisien yang dicari untuk mengukur pengaruh variabel X1 dan X2

μ = kesalahan pengganggu

Model tersebut dapat ditransformasikan kedalam persamaan logaritma natural menjadi :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \mu$$

Keterangan:

Y = Mutu Pendidikan

β_0 = Konstanta

X1 = Fasilitas pendidikan

X2 = Guru profesional

β_1, β_2 = Koefisien yang dicari untuk mengukur pengaruh variabel X1 dan X2

μ = Kesalahan pengganggu
Ln = Logaritma natural

Pemilihan model ini didasarkan pada penggunaan model logaritma natural (Ln). Damodar Gujarati menyebutkan bahwa salah satu keuntungan dari penggunaan logaritma natural adalah memperkecil bagi variabel-variabel yang diukur karena penggunaan logaritma dapat memperkecil salah satu penyimpangan dalam asumsi OLS (Ordinary Least Square) yaitu heterokedastisitas.⁶³

Penggunaan data panel pada dasarnya merupakan solusi akan ketidakterediaan data time series yang cukup panjang untuk kepentingan analisis ekonometrika. Menurut Hsiao dalam Greene keunggulan penggunaan data panel dibandingkan deret waktu dan kerta lintang adalah:

- a. Dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan degrees of freedom (derajat kebebasan), data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinearitas antara variabel penjelas, dimana dapat menghasilkan ekonometri yang efisien.
- b. Data panel data, data lebih informatif, lebih bervariasi, yang tidak dapat diberikan hanya oleh data cross section dan time series saja.
- c. Panel data dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam perubahan dinamis dibandingkan data cross section.

⁶³ Damodar Gujarati, *Ekonometrika Dasar* (Jakarta: Erlangga, 1997)

b. Estimasi Model

Dalam data panel, terdapat tiga spesifikasi model yang mungkin digunakan, yakni model *common effects*, *fixed effects*, dan *random effects*. Pada kesempatan ini peneliti akan melakukan uji tahap demi tahap untuk memilih model mana yang paling sesuai. Ketiga model tersebut, yaitu:

1) Model *Common Effects*

Model *common effects* atau *pooled regression* merupakan model regresi data panel yang paling sederhana. Model ini pada dasarnya mengabaikan struktur panel dari data, sehingga diasumsikan bahwa perilaku antar individu sama dalam berbagai kurun waktu atau dengan kata lain pengaruh spesifik dari masing-masing individu diabaikan atau dianggap tidak ada. Dengan demikian, akan dihasilkan sebuah persamaan regresi yang sama untuk setiap unit cross section. Sesuatu yang secara realistis tentunya kurang dapat diterima. Karena itu, model ini sangat jarang digunakan dalam analisis data panel.

Berdasarkan asumsi struktur matriks varians-covarians residual, maka pada model *common effects*, terdapat 4 metode estimasi yang dapat digunakan, yaitu:

- a) *Ordinary Least Square (OLS)*, jika struktur matriks varians-kovarians residualnya diasumsikan bersifat homoskedatik dan tidak ada *cross sectional correlation*.

- b) *General Least Square (GLS)/ Weight Least Square (WLS): Cross Sectional Weight*, jika struktur matriks varians-kovarians residual diasumsikan bersifat heteroskedastik dan tidak ada *cross sectional correlation*,
- c) *Feasible Generalized Least Square (FGLS)/ Seemingly Uncorrelated Regression (SUR)* atau *Maximum Likelihood Estimator (MLE)*, jika struktur matriks varians-kovarians residual diasumsikan bersifat heteroskedastik dan ada *cross sectional correlation*,
- d) *Feasible Generalized Least Square (FGLS)* dengan proses *autoregressive (AR)* pada error term-nya, jika struktur matriks varians-kovarians residualnya diasumsikan bersifat heteroskedastik dan ada korelasi antar waktu pada residualnya.

2) **Model Fixed Effects**

Jika model *common effects* cenderung mengabaikan struktur panel dari data dan pengaruh spesifik masing-masing individu, maka model *fixed effects* adalah sebaliknya. Pada model ini, terdapat efek spesifik individu α_i dan diasumsikan berkorelasi dengan variabel penjelas yang teramati X_{it} .

Berdasarkan asumsi struktur matriks varians-kovarians residual, maka pada model *fixed effects*, terdapat 3 metode estimasi yang dapat digunakan, yaitu :

- 1) *Ordinary Least Square (OLS/LSDV)*, jika struktur matriks varians-kovarians residualnya diasumsikan bersifat homoskedatik dan tidak ada *cross sectional correlation*.
- 2) *Weighted Least Square (WLS)*, jika struktur matriks varians-kovarians residualnya diasumsikan bersifat heteroskedastik dan tidak ada *cross sectional correlation*.
- 3) *Seemingly Uncorrelated Regression (SUR)*, jika struktur matriks varians-kovarians residualnya diasumsikan bersifat heteroskedastik dan ada *cross sectional correlation*.

3) Model *Random Effects*

Pendekatan ini mengasumsikan *unobservable individual effects* (u_{it}) tidak berkorelasi dengan *regressor* (X) atau dengan kata lain u_{it} diasumsikan bersifat random. Sebelum model diestimasi dengan model yang tepat, terlebih dahulu dilakukan uji spesifikasi apakah *fixed effects* atau *random effects* atau keduanya memberikan hasil yang sama.

2. Uji Metode Estimasi data panel

Sebelum menentukan metode estimasi data panel yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka harus dilakukan beberapa pengujian. Untuk menentukan apakah model panel data dapat diregresi dengan metode *Common Effects*, metode *Fixed Effects*(FE) atau metode *Random Effects*(RE), maka dilakukan uji-uji sebagai berikut:

1) Uji Chow

Uji Chow dapat digunakan untuk memilih teknik dengan metode pendekatan *Pooled Least Square* (PLS) atau metode *Fixed Effects*(FE). Prosedur Uji Chow adalah sebagai berikut:

a. Buat hipotesis dari Uji Chow

- Apabila probabilitas dari *cross section* $F > 0,05$ = model *Common Effects*
- Apabila probabilitas dari *cross section* $F < 0,05$ = model *Fixed Effects*

2) Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih antara metode pendekatan *Fixed Effects*(FE) atau *Random Effects*(RE). Prosedur Uji Hausman adalah sebagai berikut:

- a. Buat hipotesis dari Uji Hausman: $=random\ effects$ dan $=fixed\ effects$.
- b. Menentukan kriteria uji: apabila *Chi-square* statistik $> Chi-square$ tabel dan *p-value* signifikan, maka hipotesis ditolak, sehingga metode FE lebih tepat untuk digunakan. Apabila *Chi-square* statistik $< Chi-square$ tabel dan *p-value* signifikan, maka hipotesis diterima, sehingga metode RE lebih tepat untuk digunakan.

3. Uji Hipotesis

a. Pengujian Signifikansi Simultan (Uji-F)

Uji F atau uji koefisien regresi secara serentak, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak.⁶⁴

Hipotesis penelitiannya:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$$

Artinya variabel X1 dan X2 secara serentak tidak berpengaruh terhadap Y.

$$H_0 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$$

Artinya variabel X1 dan X2 secara serentak berpengaruh terhadap Y.

Alpha pengujian 5% (0,05)

Kriteria pengambilan keputusannya, yaitu:

- a. $F_{\text{statistik}} \geq 0,05$, maka H_0 diterima
- b. $F_{\text{statistik}} < 0,05$, maka H_0 ditolak

b. Uji t (Partial Test)

Uji t untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak.⁶⁵ Selain itu, uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual

⁶⁴ Duwi Priyanto, *SPSS Analisa Korelasi, Regresi dan Multivariate*, (Yogyakarta: Gava Media, 2009), p. 48

⁶⁵ Duwi Priyanto, *op. cit.*, p.50

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dengan uji statistik t maka dapat diketahui apakah pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sesuai hipotesis atau tidak.

1) Hipotesis pengujian :

$$H_0 : \beta_1 \leq 0$$

$$H_i : \beta_1 > 0$$

Alpha pengujian 5% (0,05)

Kriteria pengujian:

- a) Jika $p\text{-value} > 0,05$, H_0 ditolak, maka variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan
- b) Jika $p\text{-value} \leq 0,05$, H_0 diterima, maka variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi untuk mengetahui besarnya presentasi variabel terikat yang disebabkan oleh variabel bebas. Dengan kata lain, koefisien determinasi menunjukkan ragam naik turunnya Y yang diterangkan oleh pengaruh linier X. Dalam hal ini ragam naik turunnya Y seluruhnya disebabkan oleh X. Perhitungan koefisien determinasi dapat dihitung dengan rumus:⁶⁶

$$R^2 = \frac{EES}{TSS}$$

Keterangan :

⁶⁶ Nachrowi Djalal Nachrowi, *Penggunaan Teknik Ekonometrika* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2008), p.22

EES (*Explained of Sum Squared*) = Jumlah kuadrat yang dijelaskan

TSS (*Total Sum of Squares*) = Total jumlah kuadrat

Dimana nilai R^2 terletak diantara 0 sampai dengan 1, nilai $0 \leq R^2 \leq 1$.

Jika $R^2 = 0$, berarti variabel bebas tidak bisa menjelaskan variabel perubahan variabel terikat, maka model dapat dikatakan buruk. Jika $R^2 = 1$, berarti variabel bebas mampu menjelaskan variabel perubahan variabel terikat dengan sempurna. Kondisi seperti dua hal tersebut hampir sulit diperoleh. Kecocokan model dapat dikatakan lebih baik kalau R^2 semakin dekat dengan 1.

5. Pengujian Asumsi Klasik

Menurut Greene “uji asumsi klasik dilakukan karena dalam model regresi perlu memperhatikan adanya penyimpangan-penyimpangan atas asumsi klasik, karena pada hakekatnya jika asumsi klasik tidak dipenuhi maka variabel-variabel yang menjelaskan akan menjadi tidak efisien.”⁶⁷ Konsekuensi yang muncul ketika membangun model regresi dengan data panel adalah bertambahnya komponen residual, karena adanya dimensi cross section dan time series pada data. Kondisi ini menyebabkan matriks varian kovarian residual menjadi sedikit lebih kompleks bila dibandingkan dengan model regresi klasik yang hanya menggunakan data *cross section* atau data *time series*.

⁶⁷ William H. Greene, *Econometric Analysis*, (New York : New York University, 2002), p. 307

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel bebas dan variabel terikat mempunyai distribusi normal atau tidak. Menurut Imam Ghozali, Jika data tidak berdistribusi normal maka uji statistik menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak dapat digunakan.⁶⁸

Ada beberapa metode untuk mengetahui normal atau tidak gangguan (μ) antara lain J-B test dan metode grafik. Penelitian ini akan menggunakan metode J_B test yang dilakukan dengan menghitung skweness dan kurtosis, dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 = Error berdistribusi normal

H_1 = Error berdistribusi tidak normal

Apabila nilai probabilitas untuk J_B adalah lebih besar dari 0,05 (alpha 5%), maka H_0 diterima. Model untuk mengetahui uji normalitas adalah :

$$JB = n \left[\frac{\mu_3^2}{6\mu_2^3} + \frac{(\mu_4 - 3)}{24} \right]$$

Keterangan :

n = jumlah sampel

2 = varians

3 = slewness

4 = kurtosis

⁶⁸ Imam Ghozali, *Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007), p. 110

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Deskripsi data hasil penelitian dimaksudkan untuk menyajikan gambaran umum mengenai data yang akan diolah dari tiga variabel dari penelitian ini. Variabel terikat itu sendiri adalah mutu pendidikan (Y), sedangkan variabel bebas terdiri dari dua variabel, yaitu fasilitas pendidikan (X1) dan guru profesional (X2).

1. Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan dapat dilihat melalui mutu Input, mutu proses dan mutu output. Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Dalam pendidikan berskala mikro (ditingkat sekolah), proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi. Akreditasi sekolah merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang. Untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan kompresensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Alasan kebijakan akreditasi sekolah di Indonesia adalah bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, maka setiap satuan/program pendidikan harus memenuhi atau melampaui standar yang dilakukan melalui kegiatan akreditasi terhadap kelayakan setiap satuan/program pendidikan. Dalam penelitian ini mutu pendidikan dilihat dari akreditasi sekolah jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas.

Tabel 4.1
Rata-Rata Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas Nasional Menurut
Provinsi Tahun 2010-2014

No	PROVINSI	TAHUN					Rata-rata
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Aceh	72,14	150,60	43,8	37,75	70,52	74,96
2	Sumatra Utara	79,27	66,41	78,68	79,75	69,84	74,79
3	Sumatra Barat	73,07	88,66	71,5	67,06	77,42	75,54
4	Riau	71,8	76,60	152,88	84,22	88,09	94,72
5	Kepulauan Riau	71,18	71,4	82,03	87,77	94,14	81,30
6	Jambi	78,6	60,55	65,15	71,48	70,21	69,20
7	Sumatra Selatan	78,15	78,62	78,58	79,25	65,65	76,05
8	Kepulauan Bangka Belitung	76,04	78,40	70,22	83,77	92,16	80,12
9	Bengkulu	81,64	78,43	76,97	77,57	81,44	79,21
10	Lampung	82,24	86,15	90	90,66	79,5	85,71
11	DKI Jakarta	345,78	76,02	0	32,05	59,62	102,69
12	Jawa Barat	74,79	84,50	99,98	100,78	60,50	84,11
13	Banten	75,6	58,71	56,46	68,24	81,29	68,06
14	Jawa Tengah	79,83	83,91	76,34	73,25	92,3	81,13
15	DI Yogyakarta	82,96	81,25	80,57	82,09	55,56	76,49
16	Jawa Timur	78,47	76,73	0	52,33	74,85	56,48
17	Bali	78,2	88,87	0	55,66	68,71	58,29
18	Nusa Tenggara Barat	76,26	74,38	76,71	63,07	86,35	75,35
19	Nusa Tenggara Timur	63,12	81,61	80,37	86,88	70,13	76,42
20	Kalimantan Barat	110,6	79,08	75,59	68,24	64,64	79,63
21	Kalimantan Tengah	75,69	66,67	77,61	78,93	60,72	71,92
22	Kalimantan Selatan	72,84	98,08	86,02	72,10	84,03	82,61
23	Kalimantan Timur	49,52	0	83,04	58,91	0	38,29
24	Sulawesi Utara	73,35	79,57	81,82	82,80	84,83	80,47
25	Gorontalo	0	83,40	86,08	78,88	62,25	62,12
26	sulawesi Tengah	0	60,66	0	65	61	37,33
27	Sulawesi Selatan	73,51	87,57	73,21	70,81	63,97	73,81
28	Sulawesi Barat	62,2	61,28	0	0	53,5	35,40
29	Sulawesi Tenggara	9,72	64,17	76,74	77,55	90,79	63,79
30	Maluku	69,43	39,65	73,95	75,21	89,68	69,58
31	Maluku Utara	69,5	75,62	0	63,68	58,13	53,39
32	Papua	60,28	86,25	75,22	71,8	77,14	74,14
33	Papua Barat	78,81	73,18	79,4	81,6	75,12	77,62
	INDONESIA	137,41	136,60	126,08	131,27	132,66	71,84

Sumber: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M), data diolah

Berdasarkan tabel 4.1, menunjukkan bahwa rata-rata jumlah akreditasi sekolah yang diambil dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) dari tahun 2010-2014 terlihat mengalami fluktuasi, namun berfluktuasinya akreditasi sekolah di Indonesia dari waktu ke waktu cenderung menurun. Hal ini terlihat dari tabel di atas bahwa akreditasi sekolah tertinggi di Indonesia adalah di tahun 2010 yaitu 137,41 dan kembali mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya menjadi 132,66 di tahun 2014.

Penurunan akreditasi sekolah pada tabel diatas terjadi pada tahun 2011, 2012, dan 2013. Ditahun 2011 penurunan tersebut terjadi di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian pada tahun 2012 juga terjadi penurunan namun yang paling besar penurunannya yaitu Lampung, DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Maluku Utara. Kemudian penurunan akreditasi sekolah pada tahun 2013 terutama terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.

Provinsi DKI Jakarta menjadi Provinsi yang paling tinggi jumlah akreditasi sekolah di Indonesia yang terhitung dari kurun waktu 2010-2014 sebesar 102,62 persen. Kemudian disusul dengan Provinsi Riau dan Lampung yaitu masing-masing sebesar 94,72 persen dan 85,71 persen. Sedangkan Provinsi yang sedikit jumlah akreditasi sekolah yaitu Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 38,29 persen. Kemudian Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat yaitu masing-masing sebesar 37,33 persen dan 35,40 persen.

DKI Jakarta menjadi salah satu Provinsi yang akreditasi sekolahnya cukup tinggi, hal ini dikarenakan Provinsi DKI Jakarta telah memenuhi 8 standar nasional pendidikan yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan serta penilaian pendidikan. Bisa dilihat dari memiliki perda dan pergub soal akreditasi yang mengatur regulasi mengenai akreditasi sekolah dari situlah kenapa Provinsi ini lebih unggul dari Provinsi lainnya yang ada di Indonesia.

Di Pulau Sumatera, provinsi yang memiliki mutu pendidikan tertinggi adalah Bengkulu 79,21 persen, Sumatera Selatan 76,05 persen, dan Sumatera Barat 75,54 persen. Dari tahun 2010-2014 mutu pendidikan di provinsi sumatera mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2011 sampai tahun 2012 terus mengalami penurunan. Penurunan tahun 2012 sekitar 1,27 persen dari 62,42 yang telah dicapai pada tahun 2011. Penurunan mutu pendidikan di tahun 2012 ini dikarenakan masih banyaknya akreditasi yang kadaluarsa, karena minimnya anggaran untuk mengakreditasi sekolah-sekolah. Untuk di provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi tertinggi dan di Indonesia dengan persentase mutu pendidikan sebesar 76,42 persen dan terendah di provinsi Bali 58,29 persen.

Sementara untuk di Pulau Kalimantan, peningkatan mutu pendidikan mengalami fluktuatif. Terlihat bahwa hampir di seluruh provinsi di

Kalimantan ini 2014 mengalami penurunan. Mutu pendidikan tertinggi di provinsi kalimantan terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan dengan 82,61 persen, sedangkan mutu pendidikan terendah di Provinsi Kalimantan terdapat di Provinsi Kalimantan Timur dengan 38,29 persen.

Untuk di Pulau Sulawesi, mutu pendidikan tertinggi adalah provinsi Sulawesi Utara dengan rata-rata peningkatan 80,47 persen. Sementara untuk mutu pendidikan terendah adalah terdapat di provinsi Sulawesi Barat dengan persentase peningkatan hanya 35,40 persen. Di provinsi Papua, mutu pendidikan sama meningkatnya dengan provinsi-provinsi lainnya. Bisa kita lihat bahwa hampir semua provinsi di pulau ini memiliki mutu pendidikan di atas 50 persen. Ini dikarenakan Provinsi yang terdiri atas 29 kabupaten/kota ini diupayakan untuk dapat melakukan percepatan peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini, tentunya didorong secara tripartit antara pemerintah pusat dan daerah, praktisi, dan akademisi dalam pemberdayaan masyarakat secara utuh.

Sementara itu, rata-rata laju peningkatan mutu pendidikan terendah berada dibawah rata-rata nasional adalah provinsi Kalimantan Timur (38,29 persen), Sulawesi Tengah (37,33 persen) dan Provinsi Sulawesi Barat (35,40 persen).

Ada beberapa kondisi yang menyebabkan mutu pendidikan yaitu:

- a) Rendahnya Kualitas Sarana Fisik
- b) Rendahnya Kualitas Guru
- c) Rendahnya Kesejahteraan Guru

- d) Rendahnya Prestasi Siswa
- e) Kurangnya Pemerataan Kesempatan Pendidikan
- f) Rendahnya Relevansi Pendidikan dengan kebutuhan
- g) Mahalnya biaya pendidikan

2. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan adalah rata-rata fasilitas yang dikeluarkan pemerintah dalam keperluan peningkatan kualitas pendidikan. Fasilitas pendidikan oleh pemerintah mencakup pembangunan dan pemeliharaan gedung-gedung sekolah dan ruang kelas, penyediaan peralatan sekolah, pembayaran gaji guru, anggaran untuk program peningkatan kualitas guru, dan lainnya.

Tabel 4.2
Rata-Rata Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas Menurut Provinsi
Tahun 2010-2014

No	PROVINSI	TAHUN					Rata-rata
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Aceh	393	409	455	460	470	437,4
2	Sumatera Utara	945	959	981	987	991	972,6
3	Sumatera Barat	268	245	266	289	290	271,6
4	Riau	321	349	327	391	401	357,8
5	Jambi	81	96	101	210	253	148,2
6	Sumatera Selatan	203	202	203	554	567	345,8
7	Bengkulu	506	529	532	128	190	377
8	Lampung	65	65	66	447	452	219
9	Kepualuan Bangka Belitung	116	120	122	65	98	104,2
10	Kepualuan Riau	400	409	421	101	113	288,8
11	Dki Jakarta	494	512	502	469	498	495
12	Jawa Barat	1287	1304	1342	1320	1361	1322,8
13	Jawa Tengah	406	434	463	851	864	603,6
14	Di Yogyakarta	890	869	876	163	202	600
15	Jawa Timur	174	165	166	1297	1302	620,8
16	Banten	1231	1241	1263	461	582	955,6
17	Bali	167	165	170	166	184	170,4
18	Nusa Tenggara Barat	235	254	264	279	283	263
19	Nusa Tenggara Timur	272	294	314	419	420	343,8
20	Kalimantan Barat	328	327	336	365	371	345,4
21	Kalimantan Tengah	176	183	196	216	218	197,8
22	Kalimantan Selatan	164	168	173	182	204	178,2
23	Kalimantan Timur	249	243	250	261	268	254,2
24	Sulawesi Utara	200	200	208	206	211	205
25	Sulawesi Tengah	45	45	49	185	189	102,6
26	Sulawesi Selatan	165	159	166	539	546	315
27	Sulawesi Tenggara	456	478	501	255	301	398,2
28	Gorontalo	59	58	61	51	62	58,2
29	Sulawesi Barat	200	220	227	73	87	161,4
30	Maluku	202	197	217	241	255	222,4
31	Maluku Utara	119	146	167	164	172	153,6
32	Papua	158	167	170	106	124	145
33	Papua Barat	61	85	99	206	209	132
	INDONESIA	395,33	403,27	414,12	427,87	447,03	356,55

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel 4.2 rata-rata fasilitas pendidikan yang diambil dari Badan Pusat Statistik dari tahun 2010-2014 terlihat bahwa rata-rata fasilitas pendidikan yang dibangun oleh pemerintah atau swasta di setiap provinsi Indonesia mengalami fluktuasi. Kenaikan fasilitas sekolah pada tahun 2010 sebanyak 395,33 sekolah, tahun 2011 sebanyak 403,27 sekolah, tahun 2012 sebanyak 414,12 sekolah, tahun 2013 sebanyak 427,87 sekolah dan tahun 2014 sebanyak 447,03 sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2010-2014 rata-rata peningkatan fasilitas sekolah sangat signifikan. Dapat dikatakan bahwa kesempatan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi bagi penduduk di pedesaan terpencil di Indonesia pemerintah sudah mulai diperhatikan oleh pemerintah. Dari 33 provinsi hanya provinsi Jawa Barat peningkatan fasilitas sekolah yang tertinggi yaitu 1322,8 sekolah.

Beberapa provinsi memiliki rata-rata fasilitas pendidikan di atas rata-rata nasional yaitu provinsi DKI Jakarta 1322,8 sekolah, Sumatera Utara 972,6 sekolah dan Banten 955,6 sekolah. Sedangkan 5 provinsi terendah yang memiliki rata-rata fasilitas pendidikan yaitu provinsi Sulawesi Tengah 102,6 sekolah, Kepulauan Bangka Belitung 104,2 sekolah, Papua Barat 132 sekolah, Papua 145 sekolah dan Maluku Utara 153,6 sekolah. Dengan kondisi pendidikan di Indonesia yang masih rendah memperlihatkan bahwa program pemerintah di bidang pendidikan yaitu wajib belajar 9 tahun belum berhasil dilaksanakan.

Di Pulau Sumatera fasilitas pendidikan tertinggi ada di Provinsi Sumatera Utara dengan rata-rata fasilitas pendidikan 972,6 sekolah. Sedangkan untuk yang terendah di pulau Sumatera terdapat di provinsi Sumatera Barat dengan rata-rata 271,6 sekolah.

Di Pulau Jawa fasilitas pendidikan tertinggi berada di Provinsi Jawa Barat yang sekaligus tingkat fasilitas pendidikan tertinggi di Indonesia dengan rata-rata 1322,8 sekolah. Meski rata-rata tertinggi, hal ini bisa tercermin bahwa peningkatan fasilitas pendidikan di tanah Jawa belum bisa dirasakan oleh semua kalangan karena walau sekolah-sekolah sudah semakin banyak tetapi biaya pendidikanlah yang menjadi satu permasalahan, dikarenakan masih banyak orangtua yang bekerja sebagai petani. Untuk yang terendah, terdapat di provinsi Jawa Tengah dengan rata-rata fasilitas pendidikan 603,6 sekolah.

Di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, rata-rata fasilitas pendidikan masih sangat rendah terutama di Provinsi Bali yang rata-rata hanya 170,4 sekolah. Berbeda dengan provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki fasilitas pendidikan 343,8 sekolah.

Di Pulau Kalimantan fasilitas pendidikan masih mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan fasilitas pendidikan tertinggi yaitu provinsi Kalimantan Barat 345,4 sekolah dan terendah Kalimantan Selatan dengan rata-rata 178,2 sekolah.

Di Pulau Sulawesi fasilitas pendidikan juga mengalami peningkatan. Meskipun mengalami peningkatan fasilitas pendidikan di Sulawesi tetapi

belum semua Provinsi di Sulawesi merasakannya. Di Provinsi Sulawesi Tenggara hanya memiliki rata-rata fasilitas pendidikan 398,2 sekolah, sedangkan untuk terendahnya terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah dengan rata-rata fasilitas pendidikan 102,6 sekolah.

Meskipun Pulau Papua ini jauh dari ibu kota negara, akan tetapi fasilitas pendidikan di pulau ini terus mengalami peningkatan yang tidak kalah dengan pulau-pulau yang lebih dekat dengan ibu kota negara. Di Provinsi Maluku merupakan provinsi yang memiliki tingkat fasilitas pendidikan tertinggi di Pulau Papua yaitu rata-ratanya adalah 222,4 sekolah, sedangkan untuk terendahnya di Provinsi Papua Barat dengan rata-rata fasilitas pendidikan 132 sekolah.

Ada beberapa alasan ekonomi yang mendasar, mengapa banyak negara berkembang memiliki kesulitan akses dalam pendidikan, sehingga menyebabkan rendahnya rata-rata fasilitas pendidikan, yaitu:

1. Semakin rendah tingkat pendidikan cenderung semakin tinggi nilai balik terhadap pendidikan sehingga nilai balik terhadap pendidikan sekolah dasar cenderung lebih tinggi di semua negara.
2. Nilai balik terhadap pendidikan di negara maju rata-rata lebih rendah dibandingkan dengan nilai balik terhadap pendidikan di negara berkembang. Semakin maju suatu negara semakin rendah rata-rata nilai balik terhadap fasilitas pendidikan.

3. Baik di negara-negara maju maupun berkembang, nilai balik pribadi (*private rate of return*) rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan nilai balik sosial.

3. Guru Profesional

Profesional guru adalah guru yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidangnya, sehingga mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Secara teknis penguatan profesional guru dikaitkan dengan pentingnya perhatian terhadap kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi sebagai bukti atau pengakuan atas kemampuan profesionalnya sebagai tenaga pendidik.

Tabel 4.3
Rata-rata Guru Profesional Sekolah Menengah Atas Menurut Provinsi
Tahun 2010-2014

No	Provinsi	TAHUN					Rata-rata
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Aceh	455	807	1141	896	484	756,6
2	Sumatra Utara	847	2805	217	1077	1041	1197,4
3	Sumatra Barat	807	906	852	211	1336	822,4
4	Riau	435	477	586	781	324	520,6
5	Kepulauan Riau	157	164	241	89	158	161,8
6	Jambi	378	408	87	159	409	288,2
7	Sumatra Selatan	988	434	852	418	662	670,8
8	Kepulauan Bangka Belitung	58	1	20	38	118	47
9	Bengkulu	163	225	298	52	171	181,8
10	Lampung	694	296	287	253	705	447
11	DKI Jakarta	997	1211	824	354	1686	1014,4
12	Jawa Barat	3770	2941	1625	1411	3891	2727,6
13	Banten	496	415	672	361	490	486,8
14	Jawa Tengah	2636	1401	1374	1368	2932	1942,2
15	DI Yogyakarta	607	227	185	67	1166	450,4
16	Jawa Timur	4165	2213	1952	1078	3425	2566,6
17	Bali	477	417	811	176	365	449,2
18	Nusa Tenggara Barat	278	372	338	315	253	311,2
19	Nusa Tenggara Timur	213	144	235	261	282	227
20	Kalimantan Barat	297	145	93	185	229	189,8
21	Kalimantan Tengah	127	139	185	178	42	134,2
22	Kalimantan Selatan	409	128	60	52	335	196,8
23	Kalimantan Timur	254	365	465	149	337	314
24	Sulawesi Utara	356	228	217	203	359	272,6
25	Gorontalo	102	10	36	39	67	50,8
26	Sulawesi Tengah	301	124	126	94	301	189,2
27	Sulawesi Selatan	1264	896	768	544	1336	961,6
28	Sulawesi Barat	118	32	36	52	173	82,2
29	Sulawesi Tenggara	394	449	294	315	578	406
30	Maluku	316	170	128	144	236	198,8
31	Maluku Utara	79	52	155	113	111	102
32	Papua	118	238	267	97	91	162,2
33	Papua Barat	31	112	121	52	20	67,2
	INDONESIA	751,42	635,24	532,12	411,96	791,72	563,52

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan tabel 4.3 terlihat bahwa rata-rata jumlah sertifikasi guru di Tahun 2010-2014 setiap provinsi Indonesia mengalami fluktuasi. Provinsi tertinggi di Indonesia yaitu Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 2727,6 guru, selanjutnya jumlah sertifikasi guru tertinggi kedua berada di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 2566,6 guru, urutan ketiga Provinsi Jawa Tengah 1942,2 guru, Sumatera Utara 1197,4 guru, dan DKI Jakarta 1014,4 guru.

Berdasarkan perbandingan provinsi di Indonesia, 3 provinsi dengan jumlah sertifikasi guru tertinggi berada di Pulau Jawa adalah Jawa Barat 2727,6 guru, Jawa Timur 2566,6 guru dan Jawa Tengah 1942,2 guru. Ketiga provinsi tersebut banyak mengundang orang untuk mengadu nasib, mencari pekerjaan terlebih lagi di kota-kota besar, tidak terkecuali perkembangan sekolah-sekolah di Pulau Jawa cukup pesat dibandingkan di Pulau lainnya di Indonesia.

Di Pulau Sumatera, rata-rata jumlah sertifikasi guru terus mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu mencolok. Rata-rata jumlah guru tersertifikasi tertinggi berada di Sumatera Utara dengan rata-rata 1197,4 guru sedangkan untuk yang terendahnya terdapat di provinsi Lampung rata-rata jumlah sertifikasi guru hanya 447 guru.

Di pulau Jawa, rata-rata jumlah sertifikasi guru juga mengalami peningkatan. Meskipun DKI Jakarta merupakan ibu kota negara, akan tetapi rata-rata jumlah sertifikasi guru di provinsi ini masih cukup rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang ada di pulau Jawa. Terlihat

sertifikasi guru tertinggi di Pulau Jawa berada di provinsi Jawa Barat dan terendah Banten dengan masing-masing rata-rata 2727,6 guru dan 486,8 guru.

Di Pulau Bali dan Nusa Tenggara rata-rata jumlah sertifikasi guru terus mengalami peningkatan dengan perkembangan sekolah-sekolah yang terus semakin banyak. Terlihat bahwa di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, sertifikasi guru tertinggi berada di Provinsi Bali dan terendah berada di provinsi Nusa Tenggara Timur dengan rata-rata jumlah sertifikasi guru 449,2 guru dan 227 guru.

Di Pulau Kalimantan, rata-rata sertifikasi guru terus mengalami peningkatan. Dengan banyaknya guru-guru yang mengikuti pelatihan UKG dan PLPG tidak heran hampir semua provinsi di Pulau ini memiliki rata-rata sertifikasi guru terus mengalami peningkatan. Rata-rata jumlah sertifikasi tertinggi berada di Provinsi Kalimantan selatan dan terendah di Provinsi Kalimantan Timur dengan masing-masing 196,8 guru dan 314 guru.

Sementara di Pulau Sulawesi, rata-rata sertifikasi guru tertinggi berada di Provinsi Sulawesi Selatan dan terendah Sulawesi Barat dengan masing-masing 961,6 guru dan 82,2 guru dan di Pulau Papua, rata-rata sertifikasi guru berada di provinsi Papua dengan rata-rata sertifikasi guru 162,2 guru dan provinsi yang memiliki rata-rata sertifikasi guru terendah di pulau papua adalah Maluku Utara dengan rata-rata sertifikasi guru 102 guru.

Perbedaan sertifikasi guru pada setiap provinsi di Indonesia mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat melatarbelakangi perbedaan sertifikasi tersebut:

1. Rendahnya kualifikasi akademik
2. Rendahnya pendidikan dan pelatihan
3. Rendahnya pengalaman mengajar
4. Rendahnya penilaian dari kepala sekolah dan pengawas
5. Rendahnya keterampilan melaksanakan prosedur mengajar atau kegiatan pembelajaran di kelas.

B. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data panel dan diolah menggunakan program *Eviews 7.0*. *Eviews* digunakan untuk mengolah data statistika dan data ekonometrika, kelebihan dari program ini adalah kemampuannya dalam mengolah data panel menjadi lebih mudah, karena dapat diperlakukan sebagai data *cross section*, *time series*, maupun sebagai data panel.

Model regresi data panel dapat dilakukan melalui tiga model estimasi, yaitu *common effects*, *fixed effects*, dan *random effects*. Untuk menentukan metode panel yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka harus dilakukan beberapa pengujian. Uji Chow dan Uji Hausman merupakan pengujian yang dapat digunakan dalam menentukan apakah model panel dapat diregresikan dengan metode *Pooled Least Square* (PLS), metode *Fixed Effects*(FE), atau metode *Random Effects* (RE). Untuk menentukan apakah model panel data diregresi dengan metode *Pooled Least Square* atau dengan metode *Fixed Effects*, maka dilakukan uji Chow. Apabila dari hasil uji tersebut ditentukan bahwa metode *Pooled Least Square* yang digunakan, maka tidak perlu diuji kembali dengan pengujian Hausman. Namun, apabila dari hasil uji tersebut ditentukan bahwa metode *Fixed Effects* yang digunakan, maka harus ada uji lanjutan dengan pengujian hausman untuk lebih memilih antara metode *Fixed Effects*, atau metode *Random Effects* yang akan digunakan. Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau probabilitas dari *cross section* $F > 0,05$ maka H_0 diterima, artinya peneliti

dapat menggunakan *model common effects* dan pengujian berhenti sampai pada uji Chow. Namun, apabila *cross section F* < 0.05 maka H_0 ditolak yang berarti perlu dilakukan uji selanjutnya yakni uji Hausman.

Tabel 4.4

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: ADE

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.234537	(32,130)	0.0049
Cross-section Chi-square	43.782591	32	0.0001

Pada tabel terlihat bahwa nilai probabilitas dari *cross section F* adalah **0.0049** < 0.05 maka H_0 ditolak. Sehingga metode yang digunakan adalah metode *Fixed Effect*. Oleh karena itu perlu dilakukan uji selanjutnya yakni uji Hausman, yaitu untuk menentukan metode mana yang paling tepat digunakan, apakah metode *Fixed Effect* atau metode *Random Effect*. Apabila nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai *Chi Square* dengan nilai probabilitas uji Hausman < 0.05 maka dapat disimpulkan H_0 ditolak. Namun apabila nilai probabilitas uji Hausman > 0.05 maka H_0 diterima yang berarti model yang digunakan adalah *model random effects*.

Tabel 4.5**Hasil Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: ADE

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.681844	2	0.0048

Apabila nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai *Chi Square* dengan nilai probabilitas uji Hausman < 0.05 maka dapat disimpulkan H_0 ditolak. Namun apabila nilai probabilitas uji Hausman > 0.05 maka H_0 diterima yang berarti model yang digunakan adalah *model random effects*. Berdasarkan Uji Hausman diatas menunjukkan bahwa besarnya nilai probabilitas Hausman adalah sebesar **0.0048** < 0.05 maka H_0 ditolak, yang artinya bahwa model yang digunakan ialah model *fixed effects*.

1. Persamaan Regresi

Pengujian ini menggunakan persamaan regresi linier berganda, yaitu untuk mengetahui pengaruh secara kuantitatif dari Fasilitas Pendidikan (X_1) dan Guru Profesional (X_2) terhadap Mutu Pendidikan (Y). analisis digunakan karena jumlah variabel bebas yang diteliti lebih dari satu untuk menganalisis pengaruh antara variabel terikat dengan variabel bebasnya.

Berdasarkan pengolahan data yang sudah dilakukan, diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut :

Tabel 4.6
Hasil Persamaan Regresi

Dependent Variable: AKRE?

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)

Date: 07/01/15 Time: 03:05

Sample: 2010 2014

Included observations: 5

Cross-sections included: 33

Total pool (balanced) observations: 165

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.958940	0.537720	2.998712	0.0497
FASIL?	0.194984	0.057930	3.008204	0.0477
GURP?	0.843685	0.059370	16.28878	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_ACEH—C	-0.716073			
_SUMUT—C	-0.092577			
_SUMBAR—C	0.973408			
_RIAU—C	0.470256			
_JAMBI—C	0.856959			
_SUMSEL—C	-0.562470			
_BENGKULU—C	0.128750			
_LAMPUNG—C	0.186714			
_BANGKA—C	0.354294			
_JAKARTA—C	-0.266191			
_JABAR—C	-0.821126			
_JATENG—C	-0.101781			

_YOGYAKARTA—C	-0.470821
_JATIM—C	0.186762
_BANTEN—C	-0.249777
_BALI—C	-0.385211
_NTB—C	0.501456
_NTT—C	0.250860
_KALBAR—C	0.422258
_KALTENG—C	0.290165
_KALSEL—C	0.580451
_KALTIM—C	-0.235890
_SULUT—C	0.143920
_SULTENG—C	-0.444536
_SULSEL—C	-0.377263
_SULTENG—C	-0.444536
_GORONTALO—C	-0.522255
_SULBAR—C	-0.496206
_MAL—C	0.754941
_MALUT—C	-0.838095
_PAPUA—C	0.671771
_PAPBAR—C	0.125453

Dari tabel di atas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0.958940 + 0.194984 \text{ FASIL} + 0.843685 \text{ GURP} + \epsilon$$

Dalam pengujian persamaan regresi pada 33 provinsi dalam waktu 5 tahun dapat diketahui daerah yang koefisiennya negatif dan positif. Daerah yang koefisiennya positif artinya apabila tidak terdapat fasilitas pendidikan dan guru profesional maka mutu pendidikan akan bertambah. Provinsi yang berkoefisien positif terdiri dari Sumatra Barat, Riau, Jambi,

Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Sedangkan daerah yang berkoefisien negatif adalah Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara.

Selanjutnya, setelah dilakukan pengujian ketepatan model regresi data panel dengan uji F, yang kemudian dilanjutkan dengan pengujian signifikansi pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan uji t beserta interpretasi variabel yang signifikan memengaruhi variabel dependen. Setelah itu dilakukan pengujian *goodness of fit* terhadap model data panel melalui besaran nilai Koefisien Determinasi (*R-square adjusted*). Hasil dari ketiga tahapan ini ialah sebagai berikut:

2. Uji Hipotesis

a. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan antara probabilitas dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Kriteria untuk uji t (parsial) ini adalah apabila probabilitasnya (signifikansi) $< 0,05$ maka H_0 ditolak artinya variabel bebas memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel terikat dan sebaliknya apabila probabilitas (signifikansi) $\geq 0,05$

maka H_0 diterima yang artinya variabel bebas tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel terikat. Dapat pula dilihat dari $t_{hitung} > t_{tabel}$, dengan $\alpha=5\%$ dan derajat kebebasan (df)= $n-k-1$ atau $165-2-1=162$ sehingga diperoleh t tabel sebesar 1,97472.

Tabel 4.8

Hasil Uji t

Dependent Variable: AKRE?

Method: Pooled Least Squares

Date: 07/01/15 Time: 02:20

Sample: 2010 2014

Included observations: 5

Cross-sections included: 33

Total pool (balanced) observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.958940	0.537720	2.998712	0.0497
FASIL?	0.194984	0.057930	3.008204	0.0477
GURP?	0.843685	0.059370	16.28878	0.0000

Untuk variabel rata-rata fasilitas sekolah memiliki probabilitas sebesar 0,0477 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ($0,0477 < 0,05$) yang artinya H_0 ditolak serta nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,008204 > 1,97472$). Hal ini mengindikasikan bahwa Fasilitas Pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Mutu Pendidikan secara parsial. Dalam hal ini, pengaruh dari variabel Fasilitas Pendidikan adalah berpengaruh positif

terhadap variabel Mutu Pendidikan karena nilai konstanta dari variabel Investasi Pendidikan adalah bertanda positif, yaitu 0,194984.

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel Guru Profesional memiliki probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ($0,0000 < 0,05$) yang artinya H_0 ditolak serta nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($16,28878 > 1,97472$). Hal ini mengindikasikan bahwa Guru Profesional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Mutu Pendidikan secara parsial. Dalam hal ini, pengaruh dari variabel Mutu Pendidikan karena nilai konstanta dari variabel Guru Profesional adalah bertanda positif yaitu sebesar 0,843685.

b. Uji F

Uji simultan atau uji F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi data panel yang digunakan telah tepat untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%.

Kriteria untuk uji F ini adalah apabila probabilitas (signifikansi) $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak yang artinya terdapat pengaruh secara simultan antara variabel bebas dengan variabel terikat dan sebaliknya apabila probabilitas (signifikansi) $> 0,05$ maka H_0 diterima, artinya bahwa tidak terdapat pengaruh secara simultan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Serta dengan melihat $F_{hitung} > F_{tabel}$ yakni df_1 (jumlah variabel -1) dan df_2 ($n-k-1$) dimana n ialah jumlah observasi ($165-2-1=162$) sehingga

dapat F_{tabel} sebesar 3,90. Adapun hasil uji F disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7

Hasil Uji F

R-squared	0.845797	Mean dependent var	7.603708
Adjusted R-squared	0.835683	S.D. dependent var	1.776488
S.E. of regression	0.244629	Akaike info criterion	-1.039460
Sum squared resid	2.749505	Schwarz criterion	-0.571814
Log likelihood	135.7526	Hannan-Quinn criter.	-0.899198
F-statistic	894.6796	Durbin-Watson stat	2.0341619
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dari hasil uji F (simultan) pada tabel di atas, dapat diketahui nilai dari probabilitas (F-statistik) sebesar **0,000000** dimana nilai probabilitas ini berada dibawah nilai signifikansi sebesar 5% ($0,000000 < 0,05$) serta $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ yakni $894.6796 > 3,90$. Dapat disimpulkan bahwa hasil uji F (simultan) menolak H_0 , artinya bahwa variabel Fasilitas Pendidikan dan Guru Profesional memiliki pengaruh secara simultan terhadap Mutu Pendidikan di Indonesia.

3. Analisis Koefisien Determinasi (Uji R)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa baik garis regresi sesuai dengan data aktualnya (*goodness of fit*). Koefisien determinasi ini mengukur presentase total variasi variabel dependen Y yang dijelaskan oleh variabel independen di dalam garis regresi.

Tabel 4.9**Hasil Uji R²**

R-squared	0.845797	Mean dependent var	7.603708
Adjusted R-squared	0.835683	S.D. dependent var	1.776488
S.E. of regression	0.244629	Akaike info criterion	-1.039460
Sum squared resid	2.749505	Schwarz criterion	-0.571814
Log likelihood	135.7526	Hannan-Quinn criter.	-0.899198
F-statistic	894.6796	Durbin-Watson stat	2.0341619
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dari tabel di atas diperoleh koefisien determinasi atau *Adjusted R Square* adalah **0.835683** artinya 83,56% variabel Mutu Pendidikan variasinya dapat dijelaskan oleh seluruh variabel Fasilitas Pendidikan dan Guru Profesional, sedangkan sisanya sebesar 16,44% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian.

4. Uji Asumsi Klasik

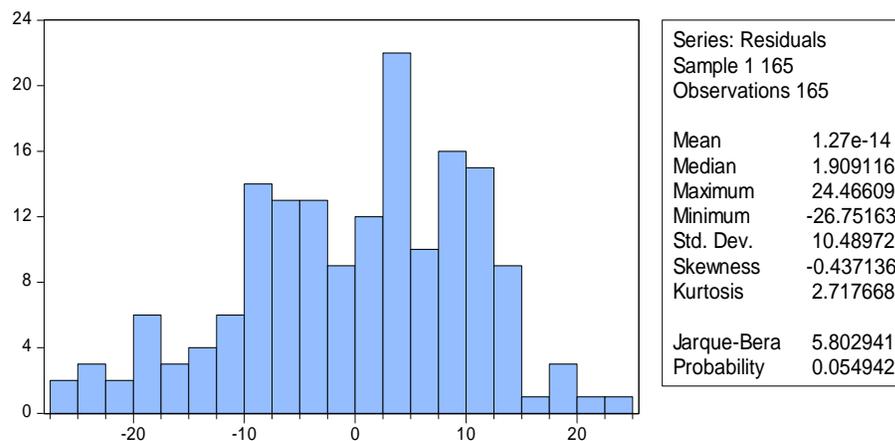
a. Uji Normalitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Model estimasi yang baik memiliki data berdistribusi normal atau mendekati normal. Dalam model regresi, pengujian uji normalitas dilakukan terhadap data residual. Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak dalam penelitian ini menggunakan uji *Jarque-Berra*. Dimana hipotesis pada uji *Jarque-Berra* adalah sebagai berikut:

- H_0 : Residual berdistribusi normal
- H_a : Residual tidak berdistribusi normal

Apabila nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari $\alpha=5\%$, maka menerima H_0 yang artinya residual data berdistribusi normal.

Uji Normalitas



Gambar 4.4

Grafik distribusi normal ini dapat dilihat dari bentuk grafik yang didistribusikan secara simetris. Berdasarkan tabel diatas, hasil pengolahan data yang dilakukan dapat dilihat bahwa residual data berdistribusi normal sehingga memenuhi asumsi normalitas. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai probabilitas statistik uji *Jarque-Bera* untuk nilai residual yaitu 0,054942 atau $0,054942 > 0,05$ sehingga H_0 diterima. Artinya bahwa data residual berdistribusi normal.

C. Pembahasan

Berdasarkan tahapan dan perhitungan yang telah dilakukan pada periode waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 terdapat 33 Provinsi

di Indonesia. Dimana bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara Fasilitas Pendidikan dan Guru Profesional terhadap Mutu Pendidikan, penelitian dalam hal ini menggunakan model-model etimasi, dimana berdasarkan hasil penelitian model terbaik yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah model Fixed Effects. Penelitian ini mempunyai persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y = 0.958940 + 0.194984 \text{ FASIL} + 0.843685 \text{ GURP} + \epsilon$$

Nilai konstanta sebesar 0.958940 menunjukkan bahwa jika Fasilitas Pendidikan dan Guru Profesional dianggap konstan, maka rata-rata Mutu Pendidikan akan mengalami positif sebesar 0.958940. Sedangkan untuk koefisien fasilitas pendidikan memiliki nilai 0.194984 maka dapat diinterpretasikan bahwa ketika fasilitas pendidikan bertambah 0.194984 persen dengan asumsi *ceteris paribus*, maka mutu pendidikan naik sebesar 0.958940 persen. Sama halnya dengan guru profesional, nilai koefisien variabel guru profesional sebesar 0.843685 dapat diinterpretasikan bahwa ketika guru profesional naik 0.843685 persen dengan asumsi *ceteris paribus*, maka mutu pendidikan akan mengalami kenaikan sebesar 0.958940 persen.

Dalam pengujian persamaan regresi dapat diketahui daerah yang koefisiennya negatif dan positif. Daerah yang koefisiennya positif artinya apabila tidak terdapat fasilitas pendidikan dan guru profesional maka mutu pendidikan akan bertambah. Provinsi yang berkoefisien positif terdiri dari Sumatra Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Jawa

Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Sedangkan daerah yang berkoeffisien negatif adalah Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara.

Hasil perbandingan antara t hitung dengan t tabel pada Fasilitas Pendidikan terlihat bahwa $t_{hitung} (3,008204) > t_{tabel} (1,97472)$ dengan signifikansi $(0,0477 < 0,05)$ lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% hal ini menunjukkan pengaruh positif antara Fasilitas Pendidikan dengan Mutu Pendidikan, ini berarti sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa Fasilitas Pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap Mutu Pendidikan. Di mana kondisi yang terjadi ketika Fasilitas Pendidikan meningkat, maka Mutu Pendidikan juga meningkat dan sebaliknya ketika Fasilitas Pendidikan menurun, Mutu Pendidikan menurun.

Pada data yang diperoleh menunjukkan bahwa Fasilitas Pendidikan tertinggi diduduki oleh Provinsi DKI Jakarta jika dibandingkan dengan Provinsi lain yang ada di Indonesia, karena Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu titik yang cukup besar kontribusinya dalam Mutu Pendidikan nasional. Salah satu penyebab tingginya jumlah Fasilitas Pendidikan atau jumlah sekolah di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebagai ibukota negara Indonesia yang multifungsi dan berkembang sebagai pusat berbagai kegiatan/aktivitas, khususnya aktivitas ekonomi yang mendorong

penduduk desa berpindah ke Jakarta (Urbanisasi). Dengan bertambahnya jumlah penduduk secara otomatis kebutuhan akan pendidikan di Jakarta semakin tinggi, maka dari itu jumlah sekolah-sekolah di Jakarta semakin tinggi pula.

Hasil penelitian ini relevan dengan teori salah satu yang harus dilakukan dalam meningkatkan mutu adalah dengan cara tersedia fasilitas yang memadai. Menurut Engkoswara bahwa “Fasilitas pendidikan merupakan faktor yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang berfungsi memberikan kemudahan-kemudahan baik bagi siswa, guru maupun bagi tenaga kependidikan lainnya yang berupa gedung atau ruang kelas, perumahan guru, penjaga sekolah, dan gedung laboratorium”.⁶⁹

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Yenni Arnas dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh profesionalisme dan sarana prasarana terhadap kualitas pelayanan pada sekolah tinggi penerbangan indonesia. Terdapat pengaruh positif dan signifikan profesionalisme dan sarana prasarana secara bersama-sama terhadap kualitas pelayanan, yang menunjukkan oleh nilai koefisien korelasi $r = 0,875$. Melalui uji signifikansi dengan menggunakan distribusi F diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 130,664. Sedangkan harga kritis nilai F_{tabel} dengan derajat kebebasan pembilangan 2 dan penyebut 83 pada $\alpha (0,05)$ adalah sebesar 3,44 sehingga terbukti bahwa $F_{hitung} (130,664) > F_{tabel} (3,44)$ menggunakan model *fixed effect*. Dengan demikian pengaruh

⁶⁹ Khairuddin, “Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dalam Peningkatan Akreditasi Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Langsa”, Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu; Maret 2014, P. 67

profesionalisme dan sarana prasarana secara bersama-sama dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

Sementara itu hasil perbandingan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} pada variabel Guru Profesional terlihat bahwa t_{hitung} (t_{tabel} (3,008204 > t_{tabel} 1,97472) dengan signifikansi ($0,0477 < 0,05$) lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% hal ini menunjukkan pengaruh positif dan signifikan, berarti Guru Profesional berpengaruh signifikan terhadap Mutu Pendidikan. Hal ini dapat diartikan bahwa meningkatnya Guru Profesional mempengaruhi Mutu Pendidikan. Hasil ini selaras dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan Paulus Yulius Indubri, *et al* dalam penelitiannya yang berjudul Manajemen Pendidikan Sekolah dan Kualitas Pendidikan (Studi pada Kualitas Pendidikan di Provinsi Papua). Berdasarkan hasil Uji Analisis Jalur P ($X_1 \rightarrow Y_2$) Hubungan kausalitas antara variabel profesional guru (X_1) terhadap kualitas pendidikan (Y_2) dengan *loading factor* (2λ) sebesar 0.343 signifikan 0.000 atau ($p < 0.05$) menggunakan model *fixed effect*. Dengan demikian hubungan antara profesional guru (X_1) mempunyai pengaruh langsung secara signifikan terhadap kualitas pendidikan (Y_1).

Secara simultan dengan pengujian F_{hitung} dibandingkan dengan F_{tabel} diperoleh nilai $F_{hitung} = 894.6796$ sedangkan $F_{tabel} = 3,90$. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka dengan tingkat kepercayaan 95% fasilitas pendidikan dan guru profesional mempengaruhi secara bersama-sama terhadap mutu pendidikan. Sementara koefisien determinasi (R^2) juga menunjukkan

angka sebesar 0.835683 yang berarti variasi dari fasilitas pendidikan (X1) dan guru profesional (X2) secara bersama-sama menjelaskan mutu pendidikan (Y) sebesar 83,56% dan sisanya (16,44%) dijelaskan oleh faktor lain.

Berdasarkan uji asumsi klasik yaitu normalitas dapat diketahui bahwa investasi pendidikan dan guru profesional terhadap mutu pendidikan dengan menggunakan uji *Jarque-Berra* memiliki distribusi normal dengan probability $0,054942 > 0,05$.

D. Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian telah berhasil menguji hipotesis yang diajukan, namun disadari bahwa penelitian ini tidak sepenuhnya sampai pada tingkat kebenaran mutlak, sehingga tidak menutup kemungkinan dilakukannya penelitian lanjutan. Hal tersebut disebabkan masih banyak terdapat keterbatasan dalam penelitian, diantaranya adalah :

1. Keterbatasan faktor yang diteliti, yaitu peneliti hanya meneliti mengenai pengaruh antara fasilitas pendidikan dan guru profesional provinsi terhadap mutu pendidikan, sedangkan mutu pendidikan juga berhubungan dengan faktor-faktor lainnya.
2. Keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh peneliti, sehingga mempengaruhi ketepatan peneliti dalam mengelola dan menginterpretasikan data yang diperoleh.

3. Keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga serta kemampuan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, sehingga masih terdapat banyak kekurangan.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh fasilitas pendidikan dan guru profesional terhadap mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas di Indonesia, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Fasilitas pendidikan secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap mutu pendidikan di Indonesia selama rentan waktu tahun 2010 sampai dengan 2014. Hal ini menunjukkan bahwa ketika fasilitas pendidikan meningkat akan memicu terjadinya kenaikan mutu pendidikan di Indonesia.
2. Guru profesional secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap mutu pendidikan di Indonesia selama rentan waktu tahun 2010 sampai dengan 2014. Hal ini menunjukkan bahwa ketika terjadi peningkatan guru profesional maka mutu pendidikan di Indonesia akan mengalami peningkatan.
3. Fasilitas pendidikan dan guru profesional secara normal, secara simultan berpengaruh terhadap mutu pendidikan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan perhitungan uji F dimana diperoleh nilai F_{hitung} (894.6796) $>$ F_{tabel} ($3,90$). Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan besarnya nilai R^2 sebesar 0.835683 . nilai ini dapat diartikan bahwa variasi mutu pendidikan dapat dijelaskan oleh

perubahan fasilitas pendidikan dan guru profesional sebesar sebesar 83,56%. Dan sisanya yaitu 16,44% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak ada dalam model penelitian ini.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka beberapa implikasi yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, antara lain:

1. Dari hasil penelitian fasilitas pendidikan terhadap mutu pendidikan, mengindikasikan ketika penggunaan fasilitas pendidikan mengalami peningkatan maka mutu pendidikan mengalami kenaikan. Peningkatan mutu pendidikan tersebut selaras dengan tingginya tingkat partisipasi para fasilitas pendidikan subsektor sekolah untuk tingkat pendidikan dengan peningkatan permintaan masyarakat terhadap bidang pendidikan.
2. Guru profesional berpengaruh positif terhadap mutu pendidikan, ini artinya sertifikasi guru yang semakin meningkat akan berdampak kepada peningkatan mutu pendidikan. Namun, pertumbuhan mutu pendidikan nasional tidak berjalan beriringan dengan pertumbuhan guru. Meningkatnya laju konversi guru menyebabkan sertifikasi guru semakin turun kualitasnya pada setiap tahunnya. Atas dasar hal tersebut maka pemerintah sebaiknya tidak berdiam diri karena hal tersebut bisa menjadi suatu ancaman bagi ketahanan pendidikan di Indonesia.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan serta implikasi di atas, maka peneliti menyampaikan saran-saran yakni:

1. Pemerintah dan segenap pemangku kepentingan harus memiliki kebijakan yang pro seperti kemudahan prosedur untuk mengadakan penataran bagi semua usaha pendidikan dan pengalaman untuk meningkatkan pengetahuan atau keterampilan mereka sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang masing-masing.
2. Pemerintah berperan aktif dalam melahirkan kebijakan makro yang berpihak kepada pendidikan seperti standarisasi pengembangan kurikulum, pemerataan dan persamaan, serta keadilan, standar mutu dan kemampuan bersaing.
3. Pemerintah harus lebih meningkatkan jumlah guru khususnya pada Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.
4. Seluruh lapisan masyarakat, terutama orang tua siswa sebagai salah satu kelompok masyarakat harus berpartisipasi mendorong terwujudnya pemenuhan fasilitas pendidikan dengan bantuan secara finansial maupun non finansial. Karena orang tua siswa juga dapat berpartisipasi dalam program sekolah guna mewujudkan kemajuan sekolah secara bersama-sama.

5. Peneliti menyarankan kepada calon peneliti selanjutnya untuk melihat mutu pendidikan tidak hanya dari sisi fasilitas pendidikan dan guru profesional, melainkan faktor lainnya seperti kurikulum, manajemen sekolah, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyanti Aam, *Perubahan Kurikulum*
<http://megasiana.com/pedulipendidikan/perubahan-kurikulum/> (diakses pada tanggal 11 April 2015)
- Amri Sofan, *Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah Dalam Teori, Konsep dan Analisis*, Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2013
- Ahmad Dzaujak, *Penunjuk Peningkatan Mutu pendidikan di sekolah Dasar*, Jakarta: Depdikbud, 1996
- Ali Idrus dan Fachruddin Saudagar, *Pengembangan Profesionalitas Guru*, Jakarta: GP Press, 2009
- Arafat Fatah: *Makalah Penjaminan Mutu Pendidikan*,
http://www.academia.edu/9548241/MAKALAH_PENJAMINAN_MUTU_PENDIDIKAN (diakses pada tanggal 09 April 2015)
- Arikunto Suharsimi Arikunto, *Pengelolaan Materiil*, Jakarta: Primakarya, 1987
- Ayal Jimmy: *Kemendikbud akui Kualitas guru masih rendah*
<http://www.antaraneews.com/berita/397722/kemdikbud-akui-kualitas-guru-masih-rendah> (diakses pada tanggal 12 April 2015)
- Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, *Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah*, Jakarta: BAN S/M, 2009
- Bafadal Ibrahim, *Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasinya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Bastian Indra, *Akuntansi Pendidikan*, Jakarta : Erlangga, 2006
- Coroners Lukman: *Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan*
<http://lukmancoroners.blogspot.com/2010/05/upaya-peningkatan-mutu-pendidikan.html> (diakses pada tanggal 08 April 2015)

- Danim Sudarwan, *Inovasi Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2002
- Dalyono, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- Djamarah Syaiful Bahri, *Guru dan Anak Didik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Djalal Nachrowi, *Penggunaan Teknik Ekonometrika*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2008
- E.Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 2008
- Fattah Nanang, “Analisis Hubungan Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Mutu Proses dan Hasil Belajar”, *Jurnal Pendidikan*, No. 3/XVIII/1999
- Fitri Azizah: *ISO Bukan Sekedar Isonisasi* <http://aziza-fitri-anakganto.blogspot.com/2014/05/iso-bukan-sekedar-isonisasi.html> (diakses pada tanggal 08 April 2015)
- Ganik Haryati Saroh: *Wajah Buruk Pendidikan di Indonesia* <http://edukasi.kompasiana.com/2012/12/21/wajah-buruk-pendidikan-di-indonesia-518560.html> (diakses pada tanggal 12 April 2015)
- Gujarati Damodar, *Ekonometrika Dasar*, Jakarta: Erlangga, 1997
- Ghozali Imam, *Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2007
- Hardjanti Rani: *Soal pendidikan, Indonesia kalah dengan Malaysia* <http://news.okezone.com/read/2012/10/23/373/708026/soal-pendidikan-indonesia-kalah-dengan-malaysia> (diakses pada tanggal 08 April 2015)
- Heri Kurniawan et all, *Regresi dan Korelasi dalam Genggaman Anda*, Jakarta: Salemba Empat, 2011
- Jalal Fasli, “Sertifikasi Guru Untuk Mewujudkan Pendidikan Yang Bermutu”, *Tesis*, Surabaya: Program Pascasarjana Unair, 2007

- Khairuddin, *“Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dalam Peningkatan Akreditasi Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Langsa”*, Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu; Maret 2014
- Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Kunandar, *Guru Profesional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Nasution, NM, *Total Quality Manajemen*, (Jakarta: Bina Aksara, 2001), p. 16
- Nurhayati dan Abdul hadis, *Manajemen Mutu Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Nur Yati: *Daerah Terpencil yang Masih Kurang Akan Fasilitas Pendidikan* <http://edukasi.kompasiana.com/2014/04/29/daerah-terpencil-yang-masih-kurang-akan-fasilitas-pendidikan-652523.html> (dikases pada tanggal 11 April 2015)
- Muktar et all, *Sekolah Berprestasi*, Jakarta: PT. Nimas Multima, 2005
- Peraturan Pemerintah RI Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2005
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2005
- Pusat Pembinaan dan Pembangunan Bahasa, depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999
- Rgi/Ad : *Belum miliki akreditasi, 611 sekolah tak bisa laksanakan UN* <http://www.riau.go.id/home/content/2014/03/12/1344-belum-miliki-akreditasi-611-sekolah-tak-bisa-laksanakan> (diakses pada tanggal 12 April 2015)
- Sagala Syaiful, *Administrasi Pendidikan Konteporer*, Bandung: Alfabeta, 2002
- Sallis Edward, *Total Quality Management In Education, Manajemen Mutu Pendidikan* , Yogyakarta: IRCISoD, 2006

- Sitti Roskina Mas, “Profesionalitas Guru Dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran”, *Inovasi*, Vol. 5, No. 2, Juni 2008
- Siswantari dan Umaedi, Hardiyanto, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2007
- Suharsaputra Uhar, *Administrasi Pendidikan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013
- Umar Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Untari Risa: *Mahalnya Biaya Pendidikan di Indonesia*
<http://edukasi.kompasiana.com/2014/08/13/mahalnya-biaya-pendidikan-di-indonesia-679894.html> (diakses pada tanggal 12 April 2015)
- Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- William H. Greene, *Econometric Analysis*, New York : New York University, 2002
- Yamin Martinis, *Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp/Fax.: Rektor (021) 4893854, PR I: 4895130, PR II: 4893918, PR III: 4892926, PR IV: 4893982,
BAUK: 4750930, BAAK: 4759081, BAPSI: 4752180
Bag. UHTP: Telp. 4893726, Bag. Keuangan: 4892414, Bag. Kepegawaian: 4890536, HUMAS: 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Nomor : 0896/UN39.12/KM/2015
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Mengadakan Penelitian
untuk Penulisan Skripsi**

3 Maret 2015

Yth. Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)
Jl. RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Nama : **Ade Irma Pravitasari**
Nomor Registrasi : 8105108049
No. Telp/HP : 08977716796
Program Studi : Pendidikan Ekonomi
Fakultas : Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

Dengan ini kami mohon diberikan ijin mahasiswa tersebut, untuk dapat mengadakan penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka Penulisan Skripsi. Skripsi tersebut dengan judul :

"Pengaruh Fasilitas Pendidikan dan Kualitas Guru Terhadap Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Indonesia Periode Tahun 2009-2013"

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Administrasi
Akademik dan Kemahasiswaan,



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi
2. Kaprog / Jurusan Ekonomi dan Administrasi

Syaifulah
P 195702161984031001

Lampiran 1

MUTU PENDIDIKAN TAHUN 2010-2014

No	PROVINSI	TAHUN					Rata-rata
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Aceh	72,14	150,60	43,8	37,75	70,52	74,96
2	Sumatra Utara	79,27	66,41	78,68	79,75	69,84	74,79
3	Sumatra Barat	73,07	88,66	71,5	67,06	77,42	75,54
4	Riau	71,8	76,60	152,88	84,22	88,09	94,72
5	Kepulauan Riau	71,18	71,4	82,03	87,77	94,14	81,30
6	Jambi	78,6	60,55	65,15	71,48	70,21	69,20
7	Sumatra Selatan	78,15	78,62	78,58	79,25	65,65	76,05
8	Kep Bangka Belitung	76,04	78,40	70,22	83,77	92,16	80,12
9	Bengkulu	81,64	78,43	76,97	77,57	81,44	79,21
10	Lampung	82,24	86,15	90	90,66	79,5	85,71
11	DKI Jakarta	345,78	76,02	0	32,05	59,62	102,69
12	Jawa Barat	74,79	84,50	99,98	100,78	60,50	84,11
13	Banten	75,6	58,71	56,46	68,24	81,29	68,06
14	Jawa Tengah	79,83	83,91	76,34	73,25	92,3	81,13
15	DI Yogyakarta	82,96	81,25	80,57	82,09	55,56	76,49
16	Jawa Timur	78,47	76,73	0	52,33	74,85	56,48
17	Bali	78,2	88,87	0	55,66	68,71	58,29
18	Nusa Tenggara Barat	76,26	74,38	76,71	63,07	86,35	75,35
19	Nusa Tenggara Timur	63,12	81,61	80,37	86,88	70,13	76,42
20	Kalimantan Barat	110,6	79,08	75,59	68,24	64,64	79,63
21	Kalimantan Tengah	75,69	66,67	77,61	78,93	60,72	71,92
22	Kalimantan Selatan	72,84	98,08	86,02	72,10	84,03	82,61
23	Kalimantan Timur	49,52	0	83,04	58,91	0	38,29
24	Sulawesi Utara	73,35	79,57	81,82	82,80	84,83	80,47
25	Gorontalo	0	83,40	86,08	78,88	62,25	62,12
26	sulawesi Tengah	0	60,66	0	65	61	37,33
27	Sulawesi Selatan	73,51	87,57	73,21	70,81	63,97	73,81
28	Sulawesi Barat	62,2	61,28	0	0	53,5	35,40
29	Sulawesi Tenggara	9,72	64,17	76,74	77,55	90,79	63,79
30	Maluku	69,43	39,65	73,95	75,21	89,68	69,58
31	Maluku Utara	69,5	75,62	0	63,68	58,13	53,39
32	Papua	60,28	86,25	75,22	71,8	77,14	74,14
33	Papua Barat	78,81	73,18	79,4	81,6	75,12	77,62
	INDONESIA	137,41	136,60	126,08	131,27	132,66	71,84

Sumber: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah

Lampiran 2

FASILITAS PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2010-2014

No	PROVINSI	SEKOLAH					Rata-rata
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Aceh	393	409	455	460	470	437,4
2	Sumatera Utara	945	959	981	987	991	972,6
3	Sumatera Barat	268	245	266	289	290	271,6
4	Riau	321	349	327	391	401	357,8
5	Jambi	81	96	101	210	253	148,2
6	Sumatera Selatan	203	202	203	554	567	345,8
7	Bengkulu	506	529	532	128	190	377
8	Lampung	65	65	66	447	452	219
9	Kep Bangka Belitung	116	120	122	65	98	104,2
10	Kepulauan Riau	400	409	421	101	113	288,8
11	Dki Jakarta	494	512	502	469	498	495
12	Jawa Barat	1287	1304	1342	1320	1361	1322,8
13	Jawa Tengah	406	434	463	851	864	603,6
14	Di Yogyakarta	890	869	876	163	202	600
15	Jawa Timur	174	165	166	1297	1302	620,8
16	Banten	1231	1241	1263	461	582	955,6
17	Bali	167	165	170	166	184	170,4
18	Nusa Tenggara Barat	235	254	264	279	283	263
19	Nusa Tenggara Timur	272	294	314	419	420	343,8
20	Kalimantan Barat	328	327	336	365	371	345,4
21	Kalimantan Tengah	176	183	196	216	218	197,8
22	Kalimantan Selatan	164	168	173	182	204	178,2
23	Kalimantan Timur	249	243	250	261	268	254,2
24	Sulawesi Utara	200	200	208	206	211	205
25	Sulawesi Tengah	45	45	49	185	189	102,6
26	Sulawesi Selatan	165	159	166	539	546	315
27	Sulawesi Tenggara	456	478	501	255	301	398,2
28	Gorontalo	59	58	61	51	62	58,2
29	Sulawesi Barat	200	220	227	73	87	161,4
30	Maluku	202	197	217	241	255	222,4
31	Maluku Utara	119	146	167	164	172	153,6
32	Papua	158	167	170	106	124	145
33	Papua Barat	61	85	99	206	209	132
	INDONESIA	395,33	403,27	414,12	427,87	447,03	356,55

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 3

Guru Profesional Menurut Provinsi Tahun 2010-2014

No	Provinsi	TAHUN					Rata-rata
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Aceh	455	807	1141	896	484	756,6
2	Sumatra Utara	847	2805	217	1077	1041	1197,4
3	Sumatra Barat	807	906	852	211	1336	822,4
4	Riau	435	477	586	781	324	520,6
5	Kepulauan Riau	157	164	241	89	158	161,8
6	Jambi	378	408	87	159	409	288,2
7	Sumatra Selatan	988	434	852	418	662	670,8
8	Kep Bangka Belitung	58	1	20	38	118	47
9	Bengkulu	163	225	298	52	171	181,8
10	Lampung	694	296	287	253	705	447
11	DKI Jakarta	997	1211	824	354	1686	1014,4
12	Jawa Barat	3770	2941	1625	1411	3891	2727,6
13	Banten	496	415	672	361	490	486,8
14	Jawa Tengah	2636	1401	1374	1368	2932	1942,2
15	DI Yogyakarta	607	227	185	67	1166	450,4
16	Jawa Timur	4165	2213	1952	1078	3425	2566,6
17	Bali	477	417	811	176	365	449,2
18	Nusa Tenggara Barat	278	372	338	315	253	311,2
19	Nusa Tenggara Timur	213	144	235	261	282	227
20	Kalimantan Barat	297	145	93	185	229	189,8
21	Kalimantan Tengah	127	139	185	178	42	134,2
22	Kalimantan Selatan	409	128	60	52	335	196,8
23	Kalimantan Timur	254	365	465	149	337	314
24	Sulawesi Utara	356	228	217	203	359	272,6
25	Gorontalo	102	10	36	39	67	50,8
26	Sulawesi Tengah	301	124	126	94	301	189,2
27	Sulawesi Selatan	1264	896	768	544	1336	961,6
28	Sulawesi Barat	118	32	36	52	173	82,2
29	Sulawesi Tenggara	394	449	294	315	578	406
30	Maluku	316	170	128	144	236	198,8
31	Maluku Utara	79	52	155	113	111	102
32	Papua	118	238	267	97	91	162,2
33	Papua Barat	31	112	121	52	20	67,2
	INDONESIA	751,42	635,24	532,12	411,96	791,72	563,52

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Lampiran 4

Mutu Pendidikan di Pulau Sumatera

NO	PROVINSI	MUTU PENDIDIKAN					RATA-RATA
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Sumatra Utara	79,27	66,41	78,68	79,75	69,84	74,79
2	Sumatra Barat	73,07	88,66	71,5	67,06	77,42	75,54
3	Sumatra Selatan	78,15	78,62	78,58	79,25	65,65	76,05
4	Riau	71,8	76,60	152,88	84,22	88,09	94,72
5	Kepulauan Riau	71,18	71,4	82,03	87,77	94,14	81,30
6	Jambi	78,6	60,55	65,15	71,48	70,21	69,20
7	Kep Bang Bel	76,04	78,40	70,22	83,77	92,16	80,12
8	Bengkulu	81,64	78,43	76,97	77,57	81,44	79,21
9	Lampung	82,24	86,15	90	90,66	79,5	85,71
10	Aceh	72,14	150,60	43,8	37,75	70,52	74,96

Mutu Pendidikan di Pulau Jawa

NO	PROVINSI	MUTU PENDIDIKAN					RATA-RATA
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	DKI Jakarta	345,78	76,02	0	32,05	59,62	102,69
2	Jawa Barat	74,79	84,50	99,98	100,78	60,50	84,11
3	Banten	75,6	58,71	56,46	68,24	81,29	68,06
4	Jawa Tengah	79,83	83,91	76,34	73,25	92,3	81,13
5	DI Yogyakarta	82,96	81,25	80,57	82,09	55,56	76,49
6	Jawa Timur	78,47	76,73	0	52,33	74,85	56,48

Mutu Pendidikan di Pulau Bali dan Nusa Tenggara

NO	PROVINSI	MUTU PENDIDIKAN					RATA-RATA
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Bali	78,2	88,87	0	55,66	68,71	58,29
2	NTB	76,26	74,38	76,71	63,07	86,35	75,35
3	NTT	63,12	81,61	80,37	86,88	70,13	76,42

Lampiran 5

Mutu Pendidikan di Pulau Kalimantan

NO	PROVINSI	MUTU PENDIDIKAN					RATA-RATA
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Kal Bar	110,6	79,08	75,59	68,24	64,64	79,63
2	Kal Teng	75,69	66,67	77,61	78,93	60,72	71,92
3	Kal Sel	72,84	98,08	86,02	72,10	84,03	82,61
4	Kal Tim	49,52	0	83,04	58,91	0	38,29

Mutu Pendidikan di Pulau Sulawesi

NO	PROVINSI	MUTU PENDIDIKAN					RATA-RATA
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Sulawesi Utara	73,35	79,57	81,82	82,80	84,83	80,47
2	Gorontalo	0	83,40	86,08	78,88	62,25	62,12
3	sulawesi Tengah	0	60,66	0	65	61	37,33
4	Sulawesi Selatan	73,51	87,57	73,21	70,81	63,97	73,81
5	Sulawesi Barat	62,2	61,28	0	0	53,5	35,40
6	Sulawesi Tenggara	9,72	64,17	76,74	77,55	90,79	63,79

Mutu Pendidikan di Pulau Papua

NO	PROVINSI	MUTU PENDIDIKAN					RATA-RATA
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Maluku	69,43	39,65	73,95	75,21	89,68	69,58
2	Maluku Utara	69,5	75,62	0	63,68	58,13	53,39
3	Papua	60,28	86,25	75,22	71,8	77,14	74,14
4	Papua Barat	78,81	73,18	79,4	81,6	75,12	77,62

Lampiran 6

Fasilitas Pendidikan di Pulau Sumatera

NO	PROVINSI	FASILITAS PENDIDIKAN					RATA-RATA
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Aceh	393	409	455	460	470	437,4
2	Sumut	945	959	981	987	991	972,6
3	Sumbar	268	245	266	289	290	271,6
4	Riau	321	349	327	391	401	357,8
5	Jambi	81	96	101	210	253	148,2
6	SumSel	203	202	203	554	567	345,8
7	Bengkulu	506	529	532	128	190	377
8	Lampung	65	65	66	447	452	219
9	Kep Bang Bel	116	120	122	65	98	104,2
10	Kep Riau	400	409	421	101	113	288,8

Fasilitas Pendidikan di Pulau Jawa

NO	PROVINSI	FASILITAS PENDIDIKAN					RATA-RATA
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	DKI Jakarta	494	512	502	469	498	495
2	Jawa Barat	1287	1304	1342	1320	1361	1322,8
3	Jawa Tengah	406	434	463	851	864	603,6
4	DI Yogyakarta	890	869	876	163	202	600
5	Jawa Timur	174	165	166	1297	1302	620,8
6	Banten	1231	1241	1263	461	582	955,6

Fasilitas Pendidikan di Pulau Bali dan Nusa Tenggara

NO	PROVINSI	FASILITAS PENDIDIKAN					RATA-RATA
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Bali	167	165	170	166	184	170,4
2	NTT	235	254	264	279	283	263
3	NTB	272	294	314	419	420	343,8

*Lampiran 7***Fasilitas Pendidikan di Pulau Kalimantan**

NO	PROVINSI	FASILITAS PENDIDIKAN					RATA-RATA
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Kalimantan Barat	328	327	336	365	371	345,4
2	Kalimantan Tengah	176	183	196	216	218	197,8
3	Kalimantan Selatan	164	168	173	182	204	178,2
4	Kalimantan Timur	249	243	250	261	268	254,2

Fasilitas Pendidikan di Pulau Sulawesi

NO	PROVINSI	FASILITAS PENDIDIKAN					RATA-RATA
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Sulawesi Utara	200	200	208	206	211	205
2	Gorontalo	45	45	49	185	189	102,6
3	Sulawesi Tengah	165	159	166	539	546	315
4	Sulawesi Selatan	456	478	501	255	301	398,2
5	Sulawesi Barat	59	58	61	51	62	58,2
6	Sulawesi Tenggara	200	220	227	73	87	161,4

Fasilitas Pendidikan di Pulau Papua

NO	PROVINSI	FASILITAS PENDIDIKAN					RATA-RATA
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Maluku	202	197	217	241	255	222,4
2	Maluku Utara	119	146	167	164	172	153,6
3	Papua	158	167	170	106	124	145
4	Papua Barat	61	85	99	206	209	132

Lampiran 8

Guru Profesional di Pulau Sumatera

NO	PROVINSI	GURU PROFESIONAL					RATA-RATA
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Aceh	455	807	1141	896	484	756,6
2	Sumatra Utara	847	2805	217	1077	1041	1197,4
3	Sumatra Barat	807	906	852	211	1336	822,4
4	Riau	435	477	586	781	324	520,6
5	Kepulauan Riau	157	164	241	89	158	161,8
6	Jambi	378	408	87	159	409	288,2
7	Sumatra Selatan	988	434	852	418	662	670,8
8	Kep Bangka Belitung	58	1	20	38	118	47
9	Bengkulu	163	225	298	52	171	181,8
10	Lampung	694	296	287	253	705	447

Guru Profesional di Pulau Jawa

NO	PROVINSI	GURU PROFESIONAL					RATA-RATA
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	DKI Jakarta	997	1211	824	354	1686	1014,4
2	Jawa Barat	3770	2941	1625	1411	3891	2727,6
3	Banten	496	415	672	361	490	486,8
4	Jawa Tengah	2636	1401	1374	1368	2932	1942,2
5	DI Yogyakarta	607	227	185	67	1166	450,4
6	Jawa Timur	4165	2213	1952	1078	3425	2566,6

Guru Profesional di Pulau Bali dan Nusa Tenggara

NO	PROVINSI	GURU PROFESIONAL					RATA-RATA
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Bali	477	417	811	176	365	449,2
2	Nusa Tenggara Barat	278	372	338	315	253	311,2
3	Nusa Tenggara Timur	213	144	235	261	282	227

*Lampiran 9***Guru Profesional di Pulau Kalimantan**

NO	PROVINSI	GURU PROFESIONAL					RATA-RATA
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Kalimantan Barat	297	145	93	185	229	189,8
2	Kalimantan Tengah	127	139	185	178	42	134,2
3	Kalimantan Selatan	409	128	60	52	335	196,8
4	Kalimantan Timur	254	365	465	149	337	314

Guru Profesional di Pulau Sulawesi

NO	PROVINSI	GURU PROFESIONAL					RATA-RATA
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Sulawesi Utara	356	228	217	203	359	272,6
2	Gorontalo	102	10	36	39	67	50,8
3	Sulawesi Tengah	301	124	126	94	301	189,2
4	Sulawesi Selatan	1264	896	768	544	1336	961,6
5	Sulawesi Barat	118	32	36	52	173	82,2
6	Sulawesi Tenggara	394	449	294	315	578	406

Guru Profesional di Pulau Papua

NO	PROVINSI	GURU PROFESIONAL					RATA-RATA
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Maluku	316	170	128	144	236	198,8
2	Maluku Utara	79	52	155	113	111	102
3	Papua	118	238	267	97	91	162,2
4	Papua Barat	31	112	121	52	20	67,2

*Lampiran 10***Uji Chow**

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: ADE

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.234537	(32,130)	0.0049
Cross-section Chi-square	43.782591	32	0.0001

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: ADE

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.681844	2	0.0048

*Lampiran 11***PERSAMAAN REGRESI**

Dependent Variable: AKRE?

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)

Date: 07/01/15 Time: 02:21

Sample: 2010 2014

Included observations: 5

Cross-sections included: 33

Total pool (balanced) observations: 165

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.958940	0.537720	2.998712	0.0497
FASIL?	0.194984	0.057930	3.008204	0.0477
GURP?	0.843685	0.059370	16.28878	0.0000

Fixed Effects (Cross)

_ACEH—C	-0.716073
_SUMUT—C	-0.092577
_SUMBAR—C	0.973408
_RIAU—C	0.470256
_JAMBI—C	0.856959
_SUMSEL—C	-0.562470
_BENGKULU—C	0.128750
_LAMPUNG—C	0.186714
_BANGKA—C	0.354294
_RIAU—C	-0.266191
_JAKARTA—C	-0.821126
_JABAR—C	-0.101781

_JATENG—C	-0.470821
_YOGYAKARTA—C	0.186762
_JATIM—C	-0.249777
_BANTEN—C	-0.385211
_BALI—C	0.501456
_NTB—C	0.250860
_NTT—C	0.422258
_KALBAR—C	0.290165
_KALTENG—C	0.580451
_KALSEL—C	-0.235890
_KALTIM—C	0.143920
_SULUT—C	-0.444536
_SULTENG—C	-0.377263
_SULSEL—C	-0.444536
_SULTENG—C	-0.522255
_GORONTALO—C	-0.496206
_SULBAR—C	0.754941
_MAL—C	-0.838095
_MALUT—C	0.671771
_PAPUA—C	0.125453
_PAPBAR—C	-0.716073

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.845797	Mean dependent var	7.603708
Adjusted R-squared	0.835683	S.D. dependent var	1.776488
S.E. of regression	0.244629	Akaike info criterion	-1.039460
Sum squared resid	2.749505	Schwarz criterion	-0.571814

Log likelihood	135.7526	Hannan-Quinn criter.	-0.899198
F-statistic	894.6796	Durbin-Watson stat	2.0341619
Prob(F-statistic)	0.000000		

*Lampiran 12***Uji Fixed Effect**

Dependent Variable: AKRE?

Method: Pooled Least Squares

Date: 07/01/15 Time: 02:21

Sample: 2010 2014

Included observations: 5

Cross-sections included: 33

Total pool (balanced) observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.981830	0.402407	1.092800	0.0398
FASIL?	0.193029	0.980702	3.196827	0.0439
GURP?	0.532730	0.275782	16.201404	0.0000

Fixed Effects (Cross)

_ACEH--C	-0.760093
_SUMUT--C	-0.093921
_SUMBAR--C	0.527253
_RIAU--C	0.709594
_JAMBI--C	0.041236
_SUMSEL--C	-0.818264
_BENGKULU--C	0.295602
_LAMPUNG--C	0.671783
_BANGKA--C	0.427971
_RIAU--C	-0.314667
_JAKARTA--C	-0.950686
_JABAR--C	-0.325170

_JATENG—C	-0.556922
_YOGYAKARTA--C	0.205318
_JATIM--C	-0.693369
_BANTEN--C	-0.475693
_BALI--C	0.370211
_NTB--C	0.965596
_NTT--C	0.572560
_KALBAR--C	0.633001
_KALTENG--C	0.651555
_KALSEL--C	-0.109608
_KALTIM--C	0.701202
_SULUT--C	-0.936017
_SULTENG--C	-0.370211
_SULSEL--C	-0.631882
_SULTENG--C	-0.402338
_GORONTALO--C	-0.953810
_SULBAR--C	0.350746
_MAL--C	-0.125111
_MALUT--C	0.665423
_PAPUA--C	0.800216
_PAPBAR--C	-0.082185

*Lampiran 13***Random Effect Model**

Dependent Variable: AKRE?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 07/01/15 Time: 02:23

Sample: 2010 2014

Included observations: 5

Cross-sections included: 33

Total pool (balanced) observations: 165

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.998815	0.491070	2.924671	0.0493
FASIL?	0.208784	0.819237	3.327874	0.0458
GURP?	0.916475	0.147775	16.143578	0.0000

Random Effects (Cross)

_ACEH—C	-0.716073
_SUMUT—C	-0.092577
_SUMBAR—C	0.973408
_RIAU—C	0.470256
_JAMBI—C	0.856959
_SUMSEL—C	-0.562470
_BENGKULU—C	0.128750
_LAMPUNG—C	0.186714
_BANGKA—C	0.354294
_JAKARTA—C	-0.266191
_JABAR—C	-0.821126

_JATENG—C	-0.101781
_YOGYAKARTA—C	-0.470821
_JATIM—C	0.186762
_BANTEN—C	-0.249777
_BALI—C	-0.385211
_NTB—C	0.501456
_NTT—C	0.250860
_KALBAR—C	0.422258
_KALTENG—C	0.290165
_KALSEL—C	0.580451
_KALTIM—C	-0.235890
_SULUT—C	0.143920
_SULTENG—C	-0.444536
_SULSEL—C	-0.377263
_SULTENG—C	-0.444536
_GORONTALO—C	-0.522255
_SULBAR—C	-0.496206
_MAL—C	0.754941
_MALUT—C	-0.838095
_PAPUA—C	0.671771
_PAPBAR—C	0.125453
_ACEH—C	-0.716073

*Lampiran 14***Uji Poole Least Square (Common Effect)**

Dependent Variable: AKRE?

Method: Pooled Least Squares

Date: 07/01/15 Time: 03:02

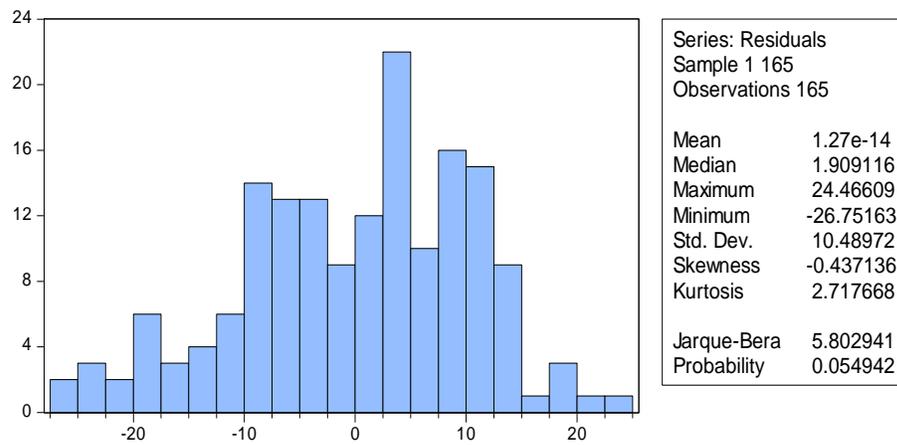
Sample: 2010 2014

Included observations: 5

Cross-sections included: 33

Total pool (balanced) observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	.28060	4.366094	11.97423	0.0000
FASIL?	0.047523	0.008877	5.353601	0.0000
GURP?	0.005496	0.003839	1.431440	0.1542
R-squared	0.181228	Mean dependent var		72.43667
Adjusted R-squared	0.171119	S.D. dependent var		38.26151
S.E. of regression	34.83438	Akaike info criterion		9.957101
Sum squared resid	196576.3	Schwarz criterion		10.01357
Log likelihood	-818.4608	Hannan-Quinn criter.		9.980025
F-statistic	17.92860	Durbin-Watson stat		1.364345
Prob(F-statistic)	0.000000			

*Lampiran 15***Uji Normalitas**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ade Irma Pravitasari. Lahir di Bekasi, 01 Agustus 1992 adalah anak kedua dari pasangan Bapak H. Een Suwandi dan Ibu Hj. Rahmayanti yang berkediaman di Jalan Siti 01 Rt. 01/008 No. 53, Kel/Kec. Mustikajaya, Kota Bekasi. Berikut

pendidikan penulis:

Tahun 1996-1998 : TK An-Nad'wah Bekasi

Tahun 1998-2004 : SD Negeri Mustikajaya 04 Bekasi

Tahun 2004-2007 : SMP Negeri 26 Bekasi

- Kelas 8 pengurus OSIS sebagai ketua sekbid Pemuda dan Olahraga

Tahun 2007-2010 : SMA Negeri 9 Bekasi

- Kelas 11 sebagai panitia PENSI

Tahun 2010-2015 : Melalui jalur PENMABA diterima di Universitas Negeri Jakarta

- Melakukan Praktek Kerja Lapangan di Koperasi Pegawai Maritim Jakarta Utara, pada Juli 2013
- Melakukan Praktek Keterampilan Mengajar (PKM) di SMA Negeri 72 Jakarta Utara, pada Agustus 2013